

**IDEOLOGI DAN POLA REKRUTMEN KADER DEWAN  
PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016-2021**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Melengkapi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Program Studi Pemikiran Politik Islam**

**OLEH:**

**SITI EFRYANTI BATUBARA**

**NIM :44133037**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "IDEOLOGI DAN POLA REKRUTMEN KADER PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016-2021" atas nama Siti Efrayanti Batubara Nim 44133037 program studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 08 Agustus 2017.


Skripsi ini telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program Pemikiran Politik Islam.

Medan, 08 Agustus 2017  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan  
Studi Islam  
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua,

  
Drs. Muhammad Aswin, MAP  
Nip. 19680817 200312 1 003


  
1. Dra. Hj Hasnah Nasution, MA  
Nip. 19690626 199503 2 003

  
3. Prof. Dr. Amroeni, M. Ag  
Nip. 19650212 199403 1 001

Sekretaris,

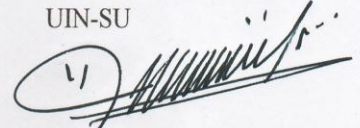
  
Muhammad Hidayat, MA  
Nip. 19770213200710 1,001

Anggota

  
2. Junaedi, M.Si  
Nip. 19810102 200912 1 009

  
4. Muhammad Hidayat, MA  
Nip. 19770213 200710 1 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
UIN-SU

  
Prof. Dr. Katimin, M. Ag  
Nip. 19650705 199303 1 003

**PERSETUJUAN**

SKRIPSI BERJUDUL

IDEOLOGI DAN POLA REKRUTMEN KADER DEWAN PIMPINAN

WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN 2016-2021

Oleh:

Siti Efryanti Batubara  
NIM. 44.13.3.037

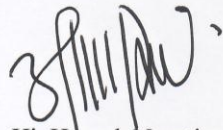
Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara

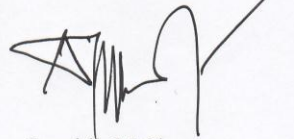
Medan, Juli 2017

Pembimbing I



Dra. Hj. Hasnah Nasution, MA  
NIP. 19690626 199503 2 003

Pembimbing II



Junaidi, M.Si  
NIP. 19810102 200912 1 009

## SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Siti Efryanti Batubara  
NIM : 44.13.3.037  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Judul Skripsi : Ideologi Dan Pola Rekrutmen Kader Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2021

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat di munaqasyahkan.

Medan, Juli 2017

Pembimbing I



Dra. Hj. Hasnah Nasution, MA  
NIP. 19690626 199503 2 003

Pembimbing II



Junaidi, M.Si  
NIP. 19810102 200912 1 009

## ABSTRAK

Nama : Siti Efryanti Batubara  
Nim : 44133037  
Fakultas/ Jurusan : Ushuluddin Dan Studi Islam  
Pembimbing I : Dra. Hj. Hasnah Nasution, MA  
Pembimbing II : Junaidi, M.Si  
Judul Skripsi : Ideologi Dan Pola Rekrutmen  
Kader Dewan Pimpinan Wilayah  
Partai Persatuan Pembangunan  
Sumatera Utara Tahun 2016-2021

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, lahir dalam suatu masa ketika kebebasan berserikat dan berkumpul secara sistematis oleh kekuasaan Orde Baru. Deklarasi fusi politik 4 partai Islam yaitu: Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Dalam penelitian ini dibahas tentang ideologi dan pola rekrutmen Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, adapun rumusan masalahnya yaitu apa ideologi dan bagaimana pola rekrutmen Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ideologi dan pola rekrutmen DPW PPP Provinsi Sumatera Utara serta melihat apa yang menjadi rujukan DPW PPP Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan ideologi dan pola rekrutmen, terlebih negara Indonesia merupakan negara yang majemuk. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sumber data primer, yaitu hasil wawancara dengan kader Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, maupun pengamatan secara langsung ke kantor DPW PPP Provinsi Sumatera Utara sebagai data sekunder, yaitu Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, mengumpulkan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan proses penelitian, Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai politik Islam berideologikan Islam dengan muatan keIndonesiaan. Dikarenakan ideologi Partai Persatuan Pembangunan adalah Islam yang bermuatan keIndonesiaan maka penerimaan Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah mutlak. Bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan gambaran umum Islam yang bermuatan keIndonesiaan. Dengan demikian kolerasi antara ideologi Partai Persatuan Pembangunan dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang sama untuk kepentingan NKRI. Partai Persatuan Pembangunan adalah partai berbasis kepada kader dan berlandung kepada massa. Artinya partai melakukan kaderisasi dan melakukan mobilisasi massa untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya.

Kata Kunci: Ideologi, Rekrutmen, dan Partai Politik.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr,Wb*

Alhamdulillah, pertama sekali penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt. Atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, juga taufiq dan inayah-Nya sehingga penelitian sederhana ini dapat diselesaikan guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1), pada jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan.

Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mana beliau membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang senantiasa berjuang dalam menghadapi Sunnahnya serta mengarahkan dan membimbing umatnya untuk mengikuti ajaran Allah Swt.

Penyelesaian Skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program S-1 untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada jurusan Pemikiran Politik Islam, Faklutas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU).

Adapun judul skripsi ini adalah: **“IDEOLOGI DAN POLA REKRUTMEN DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA ”**

Penulis menyadari bahwa menyusun suatu karya ilmiah bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah dan sudah barang tentu akan menemui berbagai kesulitan dalam berbagai hal. Demikian yang penulis rasakan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi akhirnya kesulitan-kesulitan tersebut dapat teratasi juga berkat bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Yang istimewa bagi penulis untuk orang tua tercinta Ayahanda Rafi'i Batubara dan Ibunda yang melahirkan saya Helmi Syafridah, rasa takzim dan terima kasih yang mendalam atas dukungan moril dan materil, kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak pernah habis bahkan do'a yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT. Agar penulis mendapatkan kesuksesan dalam segala hal, serta perjuangan mereka yang telah mendidik dan mengajarkan arti kehidupan.
2. Seluruh keluarga khususnya kakak Imam Husein Batubara, kakak ipar Lena Lusiana dan adik-adik Putri Asisah Batubara, Aulia Az-Azhra Batubara tersayang yang memberikan semangat dan do'a bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

4. Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam. Bapak/Ibu Wakil Dekan I Dr. H. Arifinsyah, M Ag. Bapak/Ibu Wakil Dekan II Dra. Hj. Hasnah Nasution, MA. Bapak/Ibu Wakil Dekan III Drs. Maraimbang Daulay, MA.
5. Bapak Drs. Muhammad Aswin, MAP dan Muhammad Hidayat, MA selaku Ketua Jurusan dan Wakil Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Uskhuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara.
6. Ibu Dra. Hj. Hasnah Nasution, MA dan Bapak Junaidi, M.Si. Selaku pembimbing I dan pembimbing II skripsi saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan kepada penulis dengan sabar dalam menyusun skripsi ini.
7. Para Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan.
8. Kepada seluruh informan penulis yaitu Bapak Drs. H. Yurizal Parlagutan Lubis, M. Psi. Selaku Ketua Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Jafaruddin Harahap, S.Pd, M.Si. Selaku Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Muhammad Soleh Tanjung, ST, selaku Wakil Sekretaris dan Aswan Jaya selaku kader Partai Persatuan Pembangunan.
9. Terspesial untuk sahabat, saya Khalamul Shohi yang memberikan dukungan, motivasi serta banyak membantu dalam penyelesaian perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan Pemikiran Politik Islam yang selalu setia menemani dan memberikan masukan untuk penyelesaian skripsi ini dan untuk sahabat-sahabat seperjuangan Khalamul Shohi, Abul Basri, Hasrat Hati Zamili, Fazlur Rahman Pulungan, Irfan Iswahyudi, Azwan, Khairul Ma'ruf, Riza El Rafiq, Muhammad Fauzar, Marzuki Manurung, Mustapa Kamil, Susi Marlina Munthe, Wiwin Sundari, Mawaddah Perangin-agin, Nova Choirunisa Lubis, Putri Nurhayani, Ravika Hadi, Siti Ardianti Rukmana Rambe, Dinda Wirly Dawani , lilis Purnama Ayu, Dini Rizky, Hotmaidah



Harahap, Lina Roito, Cici Pratiwi, Inun Nur Harefa, Hardiyanti, dan seluruh rekan-rekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Semoga kita merupakan orang-orang yang beruntung serta berguna bagi nusa, bangsa dan agama kelak.

11. Terimakasih untuk adek-adek kos Jln. Wiliam Iskandar Gg. Buntu No. A-249, Nia Lathifah Hidayani, Zahrotunnisa, Dahlia Atriyani, dan Shinta Dwi Aisyah yang selalu memeberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusunan dengan penuh harapan agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umum dengan segala kerendahan hati penyusun ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikumWr,Wb.***

Medan, Juli 2017

Siti Efryanti Batubara

NIM: 44.13.4.037

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Batasan Istilah.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metodologi Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
<b>A. Pengertian Ideologi.....</b>	<b>16</b>
<b>B. Pengertian Partai Politik.....</b>	<b>17</b>
<b>C. Pengertian Partai Politik Islam .....</b>	<b>21</b>
<b>D. Fungsi Partai Politik.....</b>	<b>25</b>
<b>E. Tujuan Partai Politik.....</b>	<b>35</b>
<b>F. Ideologi Dan Partai Politik .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	
<b>A. Profil Partai Persatuan Pembangunan.....</b>	<b>39</b>
<b>B. Struktur Organisasi.....</b>	<b>45</b>

**BAB IV IDEOLOGI DAN POLA REKRUTMENT DEWAN PIMPINAN  
WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

<b>A. Ideologi Partai Persatuan Pembangunan .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Pola Rekrutment Partai Persatuan Pembangunan.....</b>	<b>58</b>
<b>C. Tujuan Rekrutmen/ Kaderisasi .....</b>	<b>64</b>
<b>D. Hasil Pengkaderan .....</b>	<b>65</b>

**BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran-Saran .....</b>	<b>69</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
--------------------------------	-----------



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

Jln. William Iskandar Pasar V Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683 Medan Esate

Nomor : B. 670/USI.1/PP.009./04/2017 26 April 2017  
Lampiran :  
Prihal : Izin Riset

Yang terhormat:  
Ketua Partai PPP Sumatera Utara  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr, wb.  
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Mahasiswa Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yaitu:

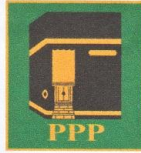
Nama : Siti Efriyanti Batubara  
NIM : 44.13.3.037  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Semester : VIII

Mahasiswa tersebut kiranya dapat dibantu untuk mendapatkan keterangan penjelasan data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Ideologi dan Pola Rekrutmen Pimpinan Wilayah Partai PPP Sumatera Utara"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan  
  
Dr. H. Arifinsyah, M. Ag  
NIP. 19680909 199403 1 004

1  
Tembusan  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



**DEWAN PIMPINAN WILAYAH  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
PROPINSI SUMATERA UTARA**

Alamat: Jln. Raden Saleh No. 11 Medan 20111 Telp. 061-4514330 Fax. 061-4150977 email.pppsumut@yahoo.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 183/Ext/DPW/A1/V/2017

Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara menerangkan bahwa;

Nama : Siti Efriyanti Batu Bara  
NIM : 44.13.3.037  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Semester : VIII

Telah melaksanakan riset di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Ideologi dan Pola Rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara."

Demikian surat ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 03 Ramadhan 1438 H  
29 Mei 2017 M

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH  
PENGURUS HARIAN**

Ketua,

Drs. H. Yulizar Paflagutan Lubis, M.Pd

Sekretaris,

Jafaruddin Harahap, S.Pd, M.Si



## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **Berkaitan dengan Ideologi**

1. Apa ideologi dari Partai Persatuan Pembangunan saat ini?
2. Kenapa ideologi PPP berideologikan Islam?
3. Menurut bapak/ibu, bagaimana hubungan antara ideologi Partai Persatuan Pembangunan Dengan Islam dan Pancasila?
4. Apa fungsi ideologi dalam Partai Persatuan Pembangunan?
5. Bagaimana penerapan ideologi partai di dalam praktiknya?
6. Apakah konsep ideologi partai pernah berubah? Dan bagaimana prosesnya?
7. Mengapa ideologi PPP kembali berideologikan Islam?

### **Berkaitan dengan Ideologi**

1. Bagaimana pola rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara?
2. Bagaimana jika ingin menjadi seorang kader/masuk dalam Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara, apakah ada syarat-syaratnya?
3. Menurut bapak/ibu, apakah pimpinan partai harus dari kader partai atau boleh dari non kader partai, baik itu di daerah atau pusat?
4. Apakah kegiatan rekrutmen dilakukan secara terus-menerus atau menjelang pemilu saja?
5. Apa tujuan rekrutmen serta pengkaderan?
6. Apakah Ada tidak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mencari simpatisan dari masyarakat? Seperti momen-momen saat ini puasa Ramadhan mengadakan safari Ramadhan ke daerah-daerah memperingati Maulid Nabi?
7. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan mencari simpatisan dari masyarakat?
8. Proses penrekrutan/penkaderan yang melahirkan para tokoh dalam partai. Seberapa besar pengaruh tokoh dalam mendukung suara dalam pemilu atau memajukan partai?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Sti Efryanti Barubara
2. NIM : 44133037
3. Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 16 Juli 1995
4. Anak ke/dari : 2 (Dua) /4 (Empat) Bersaudara
5. Alamat : Kp. Pajagan Ds. Benda RT 01/RW 11 Kec. Cicurung  
Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat
6. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Rafi'i Batubara
  - b. Ibu : Helmi Syafridah
7. Alamat Orang Tua : Kp. Pajagan Ds. Benda RT 01/RW 11 Kec. Cicurung  
Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat
  
8. Pendidikan
  - TK : Lembaga Pendidikan Al-Quran Thoriqotussa'adah (2001)
  - SDN : Pajagan (2007)
  - SMP : Daarul 'Uluum Lido (2010)
  - MA : Daarul 'Uluum Lido (3013)
  - Perguruan Tinggi : Masuk Insitute Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara yang telah berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Fakultas Ushuluddin dan Study Islam jurusan Pemikiran Politik Islam pada tahun 2013 hingga meraih gelar Sarjana.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang multi etnik dan multi agama, Sosok keberagaman yang indah ini, dengan latar belakang keberagaman yang memiliki ciri-ciri khas masing-masing, tidak mengurangi makna kesatuan Indonesia. Motto nasional “Bhinneka Tunggal Ika” yang dipakai oleh bangsa Indonesia jelas mempertegas pengakuan adanya “kesatuan dalam keberagaman atau keragaman dalam kesatuan” dalam seluruh spektrum kehidupan kebangsaan kita.

Munculnya partai-partai politik di Indonesia juga tidak lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Terdapat dari tiga ratus kelompok etnis yang berbeda-beda di Indonesia, masing-masing kelompok mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa yang berbeda-beda dipakai, hampir semua agama besar diwakili.<sup>1</sup>

Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk memberikan kontribusi yang besar bagi lahirnya partai-partai politik dan sistem multi partai di Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, partai-partai politik yang ada tidak terlepas dari ikatan-ikatan kelompok yang kuat, khususnya yang berkaitan dengan ideologi. Herbert Feith menggambarkan corak ideologi partai-partai pada 1950-an, kedalam 5 aliran besar:<sup>2</sup>

Nasionalisme, Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme. Corak politik aliran seperti ini tidak hanya berbeda, tetapi juga bernuansa, konfliktual karena diantara mereka terdapat perbedaan-perbedaan nilai yang cukup mendasar. Sepertinya, diantara aliran-aliran yang terdapat pada partai-

---

<sup>1</sup>Faisal Ismail, *Republik Bhinneka Tunggal Ika: Mengurai Isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama, Dan Sosial Budaya*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 11.

<sup>2</sup>Kacung Marjjan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 60.



partai itu terdapat sejumlah titik singgung, tetapi juga terdapat jarak yang jauh diantara partai-partai tersebut.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai politik bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan organisasai negara. Partai politik baru ada di negara modern.

Sabagai mana subjek penelitian ilmiah, partai politik tergolong relatif muda. Baru pada awal abad ke-20 studi masalah ini di mulai. Sarjana-sarjana yang berjasa memelopori antara lain adalah M. Ostrogorsky (1902), Robert Michels (1911), Maurice Duverger (1951), dan Sigmund Neumann (1956). Setelah itu, beberapa sarjana behavioralis, seperti Joseph Lapalombara dan Myron Weiner, secara khusus meneropong masalah partai dalam hubungannya dengan pembangunan politik. Kemudian dua sarjana ini kemudian menuangkan pemikiran dan hasil studinya dalam bukunya yang berjudul *Political Parties and Political Development* (1966). Di samping itu, G. Sartori dengan bukunya *Parties and Party System: A Framework For Analyss* (1976) merupakan ahli lebih konteporer yang terkenal.<sup>3</sup>

Partai politik era modern dimaknai sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah utnuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijikan mereka.

Dalam Islam ternyata juga terdapat pembahasan mengenai pembetulan partai politik. Islam merupakan agama yang mana didalamnya terdapat pesan implisit

---

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 397.

mengenai dasar pendirian partai politik seperti yang telah dituangkan dalam QS. Al-Imran:104.<sup>4</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Menurut penulis jelaslah bahwa Islam mengajarkan kita bagaimana untuk membentuk suatu kumpulan agar menyerukan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Artinya membentuk partai adalah untuk menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran, karena melalui partai orang bisa mencapai kekuasaan kemudian melalui kuasa tersebut lah kita menyerukan kebaikan kepada orang banyak.

Pembentukan nilai ideologi partai politik di Indonesia termasuk partai Islam sangat lemah dalam praktek politik keseharian. Partai lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis dari pada nilai ideologis. Implikasinya, koalisi yang terbentuk lebih berbaris pada isu pragmatis partai politik dan melupakan ideologi formal yang dimiliki. Fenomena yang terdapat di Indonesia saat ini adalah berlomba-lombanya partai-partai politik untuk menginkluskikan diri dan mewedahi semua basis pemilih, sedangkan ideologi partai tidak lagi menjadi variabel sentral dalam pembuatan keputusan di internal partai, dan ideologi partai tidak menjadi tolak ukur lagi dalam menyusun suatu kebijakan.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung, PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2016).

Penurunan nilai ideologi dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam semakin terlihat. Hasilnya Partai-partai yang berideologikan Islam semakin mengalami penurunan dalam pemilu beberapa tahun belakangan.

Partai politik merupakan tempat berkumpulnya individu-individu yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Hafied Canggara membagi sistem kepartaian menjadi 4 bagian, yaitu;<sup>5</sup> (1) partai massa; (2) partai kader; (3) partai lindungan; dan (4) partai ideologi. Partai massa mengandalkan jumlah anggota yang besar, dan biasanya terdiri dari banyak golongan yang bergabung dibawah payung partai, misalnya Golkar. Partai kader mengutamakan keketatan organisasi dan disiplin para anggotanya. Untuk menjaga kemurnian perjuangan partai, misalnya PKS. Partai lindungan, memiliki organisasi nasional, disiplin lemah dan tidak mementingkan aturan. Tujuannya hanya untuk memenangkan pemilu. Oleh karena itu, aktivitasnya hanya kelihatan menjelang pemilu. Contoh Partai Demokrat dan Republik di AS. Partai ideologi memiliki pandangan hidup yang digariskan melalui kongres atau musyawarah nasional. Penerimaan anggota partai melalui saringan, sedangkan untuk menjadi pimpinan partai harus melalui proses pengkaderan dari bawah, misalnya partai Komunis, Partai Sosialis.

Perekrutan adalah peroses, cara, perbuatan merekrut, pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya. Merekrut adalah mendaftar (memasukan) calon anggota baru.<sup>6</sup>

Perekrutan politik merupakan suatu proses melakukan pemilihan, pengangkatan dan penetapan, sehingga seseorang atau kelompok orang untuk jabatan politik dan pemerintahan. Semua partai politik melakukan proses perekrutan politik.

---

<sup>5</sup> Hafied Canggara, *Komunikasi Politik: Konsep Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 219.

<sup>6</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2005), h. 290.

Di Indonesia proses perekrutan politik dilakukan oleh kebanyakan partai hanya pada saat menjelang pemilihan umum. Setelah direkrut pada jabatan tertentu dipolitik, tidak ada jaminan loyalitas terhadap partai yang merekrut. Seseorang bisa saja menjadi “kutu loncat politik” dimana seseorang dapat saja berpindah atau meloncat partai dari satu partai ke partai lainnya.<sup>7</sup>

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang lebih baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Kuantitas individu dan massa sangat dibutuhkan partai politik dalam setiap acara pemilihan, baik itu pemilu maupun pilkada bahkan pilpres dalam memengaruhi pemilih tersebut. Dalam mencapai masa yang banyak dibutuhkan kualitas kader, karena melalui proses pengkaderan menghasilkan kualitas individu yang nantinya menjadi seorang tokoh yang kuat. Ketokohan seseorang mampu menarik simpatisan dari masyarakat yang nantinya menjadi lumbung suara dalam setiap pemilihannya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973,<sup>8</sup> Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini lahir dalam suatu masa ketika kebebasan berserikat dan berkumpul terdistorsi secara sistematis oleh kekuasaan Orde Baru.

Deklarasi fusi politik 4 partai Islam yaitu: Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Islam PERTI dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 atau 30 Dzulqaidah 1392 Hijriah. Para deklator PPP

---

<sup>7</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet, ke-3, h. 252.

<sup>8</sup> Tim Divaro dan Yugha, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 271.

adalah K.H. Idhan Cholid (NU), H.M.S. Mintaradja (Parmusi), H. Anwar Tjokroaminoto (PSII), Rusli Halil (Perti), dan K.H. Masjkur (NU).<sup>9</sup>

Sejarah perkembangan PPP sejak deklarasi fusi empat Islam tentu saja mengalami pasang surut, dalam setiap pemilu sehingga PPP memiliki beban moral sebagai penerus estafet empat partai Islam dan wadah dan penyelamat aspirasi umat Islam. sejak berdirinya sampai reformasi bergulir tahun 1998, PPP merupakan satu-satunya partai politik Islam yang menjadi wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam yang berorientasi ke Indonesia dan ke ummatan. Identitas Islam PPP mencerminkan corak “Islam ke Indonesian” atau “Islamnya orang Indonesia” yang berpegang kepada harmoni antara Universalitas Islam dan lokalitas ke Indonesia.

Dengan memperhatikan berbagai pernyataan diatas kiranya dapat dimengerti. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi saya yang berjudul “Ideologi Dan Pola Rekrutmen Kader Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Di Sumatera Utara Tahun 2016-2021”. Tetapi penulis tidak ingin terjebak dalam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan terjadinya dua kubu pengurusan baik itu di tingkat pusat hingga ke daerah. Melainkan penulis akan lebih objektif dan netral terhadap penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan pokok masalah penelitian ini adalah: “*Apa Ideologi Dan Bagaimana pola Rekrutmen Kader Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Di Sumatera Utara*”, dengan merincikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Ideologi Partai Persatuan Pembangunan?
2. Bagaimana Pola Rekrutmen Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara ?

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 273.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami apa yang menjadi objek studi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang terdapat judul ini sebagai berikut:

1. Ideologi, artinya setiap doktrin politik yang sistematis dan mencakup segala hal, mengklaim memberikan teori lengkap tentang manusia dan masyarakat yang dapat di terapkan secara universal, dan untuk mengambil darinya sebuah program tindakan politik. Ideologi dalam makna ini berusaha untuk mencakup semua hal yang relevan dengan kondisi politik manusia, dan untuk mengeluarkan doktrin itu dianggap berpengaruh dalam membentuk atau mengubah kondisi tersebut. Ideologi adalah objek utama dari banyak kritik konservatif, kebanyakan dengan dasar bahwa doktrin politik, jika sepenuhnya mungkin, tidak dapat dipisahkan dari keadaan-keadaan di mana ia dipahami, dan tidak akan pernah dapat diberikan sifat yang universal dan mencakup segala hal yang menjadi aspirasi ideologi tersebut.<sup>10</sup>
2. Rekrutmen, artinya adalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang lebih baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.<sup>11</sup>
3. Partai politik, artinya adalah suatu kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

### D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

---

<sup>10</sup> Roger Scruton, *Kamus Politik*, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 435

<sup>11</sup> Miriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 408.

<sup>12</sup> Ibid, h. 403-404.

1. Untuk mengetahui ideologi Partai Persatuan Pembangunan.
2. Untuk mengetahui pola rekrutmen kader Partai Persatuan Pembangunan.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi motivasi bagi meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir secara akademis dalam melihat suksesi politik dan strategi politik dalam bidang ilmu politik khususnya.
- b. Sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk yang tertarik dan konsentrasi dengan bidang dan pemahaman yang sama.
- c. Sebagai dokumentasi bagi Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pemikiran Politik Islam khususnya.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, terutama dibidang politik, dan khususnya mengenai Partai Politik, dan ideologi serta pola rekrutmen kader dalam berpolitik di Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebagai masukan bagi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk lebih meningkatkan Ideologi dan pola rekrutmen politik.
- c. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat luas dalam melihat Partai Persatuan Pembangunan, terkhusus bila ingin bergabung sebagai kader atau simpatisan.
- d. Sebagai tugas akhir bagi penulis untuk mencapai gelar sarjana S1 di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu ingin mendeskripsikan dan menentukan makna serta pemahaman mendalam atas

permasalahan berdasarkan latar sosialnya. Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat.

Deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada satu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri yang demikian memungkinkan studi ini amat dapat mendalam dan demikian bahwa kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini. Karena itu, penelitian ini bersifat mendalam dan “menusuk” sasaran penelitian. Tentunya untuk mencapai maksud ini peneliti membutuhkan waktu yang relatif lama.<sup>13</sup>

## **2. Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh, dalam setiap penelitian dibutuhkan objek atau sasaran penelitian, yang objek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak, dalam survei penelitian tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut, dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representasi objek penelitian. Oleh karena itu, persoalan penting dalam pengumpulan data yang diperhatikan adalah “bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah representatif.”<sup>14</sup>

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai sumber primernya yaitu bapak Jafaruddin Harahap, SPd, MSi selaku sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, bapak Muhammad Soleh Tanjung, ST selaku

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-4, h. 68-69.

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 65.



wakil sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Azwan Jaya sebagai tokoh dan kader Partai Persatuan Pembangunan. Selain dari informan data primer juga diperoleh melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ialah data sumber data pendukung dan penunjang dalam penelitian ini. Adapun sebagai penunjang penulis mengambil buku-buku tulisan-tulisan yang membahas mengenai partai, ideologi dan pola rekrutmen.

Adapun buku-buku sebagai sumber data pendukung dalam penelitian ini yaitu: Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Prof. Miriam Budiarjo, Pengantar Sosiologi Politik karangan Prof. Dr. Damsar, PPP dan Politik Order Baru karangan Syamsuddin Haris, Profil Partai Politik Peserta pemilu disusun oleh Tim Divaro dan Yugha, dan Markering Politik Antara Pemahaman Dan Realitas karangan Prof. Firmanzah, PH.D.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data maka peneliti menggunakan tektik pengumpulan data yang terdiri dari: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yang pertama data primer merupakan data langsung yang berkaitan dengan ideologi dan pola rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan, yaitu tokoh-tokoh Partai Persatuan Pembangunan, yang ada didalam Pengurusan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan maupun yang tidak dalam pengurusan. Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini sedang mengalami konflik internal yaitu adanya kedua pengurusan baik itu di tingkat pusat maupun daerah, saya selaku peneliti tidak berpihak kesatu sisi, melainkan peneliti akan melakukan pengumpulan data kedua belah pihak Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dan yang kedua adalah data sekunder berupa data yang berkaitan dan menjadi rujukan tambahan dalam penelitian mengenai Partai Persatuan Pembangunan.

Terpenting dalam penjelasan ini adalah alasan mengapa metode ini dilakukan, pada bagian mana yang harus dilakukan wawancara mendalam, dan bagian masalah yang mana dilakukan observasi partisipasi, atau keduanya dilakukan bersama. Atau, pengumpulan data perlu dilakukan dengan melibatkan beberapa orang penting untuk dilakukan diskusi terfokus.

Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian yaitu:

**a. Observasi**

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Kerana itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Di dalam pembahasan ini kata observasi dan pengamatan secara bergantian.

Seseorang yang sedang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan mata saja, tetapi selalu mengaitkannya apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan dengan oleh pancaindra lainnya, seperti yang ia dengar, apa yang ia cicip, apa yang ia cium dari penciumannya, bahkan dari apa yang ia rasakan dari sentuhan-sentuhannya kulitnya.<sup>15</sup>

Penulis melakukan observasi langsung dengan mendatangi kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jln. Raden Saleh No. 11 Medan pada Senin 1 Mei 2017, untuk melihat serta mengajukan surat ijin riset ke Kantor DPW PPP Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 5 dan 29 Mei 2017 untuk melihat kegiatan yang berkaitan dengan data yang

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, h. 115.

diperlukan dalam penulisan skripsi ini sekaligus melakukan wawancara langsung. Tanggal 15 Juli 2017 meminta bahan untuk melengkapi penulisan skripsi.

**b. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.<sup>16</sup>

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Dia pula berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Namun, kadang kala informan pun dapat menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara mulai dilaksanakan dan diakhiri.

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan. Sutrisno Hadi dalam hal ini mengemukakan bahwa *interview* bahwa metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.<sup>17</sup>

Penulis melakukan wawancara langsung di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jln. Raden Saleh No. 11 Medan. adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini ialah bapak Jafaruddin Harahap, S.Pd., M.Si selaku Sekretaris DPW PPP Sumatera Utara pada hari Jum'at 5 Mei 2017, bapak Muhammad Soleh Tanjung, ST selaku Wakil

---

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial lainnya*, h. 108.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 193.

Sekretaris DPW PPP Sumatera Utara pada hari Jum'at 5 Mei dan 29 Mei 2017, penulis juga melakukan wawancara tidak langsung dengan salah satu tokoh kader Partai Persatuan Pembangunan yaitu bapak Aswan Jaya yaitu mengajukan pertanyaan melalui email pada tanggal 5 Juni 2017. Penulis mengajukan beberapa hal yang berkaitan dengan ideologi dan pola rekrutmen Dewan Pimpinan Wilayah Partai Paersatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara kepada semua narasumber.

### c. **Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada pada Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Seluruh data dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti, tetapi dalam kegiatan ini peneliti didukung instrumen sekunder yaitu: foto, catatan, dan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti. Teknik tersebut yaitu penelitian kualitatif diperlukan dokumen dan foto, sehubungan dengan setting tentunya yang digunakan untuk menganalisis data.<sup>18</sup> Foto foto yang penulis dapatkan nantinya akan di lampirkan di bagian lampiran skripsi.

## **4. Metode Analisis Data**

Semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara ataupun *focus group discussion*. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula

---

<sup>18</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, keagamaan dan pendidikan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2011), h.124.

menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan (wawancara dan observasi) melalui tradisi teknik analisis data tersebut, peneliti seharusnya memilih teknik analisis data apa yang yang digunakan (karena jumlahnya yang sama) sesuai dengan objek penelitian.

Data tentu saja perlu di susun ke dalam pola tertentu, kategori tertentu, fokus tertentu, atau pokok masalah tertentu. Oleh karena itu, setiap catatan harian yang dihasilkan dalam pengumpulan data, apakah hasil wawancara atau hasil observasi, perlu direduksi dan dimasukkan ke dalam pola, kategori, fokus atau tema tertentu yang sesuai. Hasil reduksi tersebut perlu di “display” secara tertentu masing-masing pola, kategori, fokus, atau tema yang hendak dipahami dan dimengerti “duduk soalnya”. Dan akhirnya peneliti dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu dari hasil pemahaman dan pengertiannya. Pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan pengambilan kesimpulan bukan lah yang berlangsung secara linier, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif.<sup>19</sup>

Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miler dan Huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan: (1) reduksi data (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.<sup>20</sup>

#### **a. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentrasformasian, data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir. Pada awal misalnya: melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan, pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema menulis memo dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis, fungsinya untuk menajamkan menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

#### **b. Penyajian data**

---

<sup>19</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 256.

<sup>20</sup> Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209-210.

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara afik. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Masing-masing tipologi terdiri atas sub-sub tipologi yang bisa jadi merupakan urutan-urutan, atau prioritas kejadian.

**c. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi**

Penarikan kesimpulan hanyalah bagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan “temuan baru” yang berbeda dari temuan yang sudah ada.

**G. Sistematika Pembahasan**

Adapun untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan erat antar yang satu dengan yang lainnya.

**BAB I** :pada bab ini peneliti menggunakan pendahuluan yaitu berupa gambaran umum penelitian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** :pada bab ini peneliti menggunakan landasan teori yaitu Pengertian Partai Politik, Fungsi Partai Politik, Tujuan Partai Politik, dan Sistem Kepertaian.

- BAB III** :pada bab ini penulis menjabarkan tentang biografi Partai Persatuan Pembangunan, dimulai dari sejarah partai, visi-misi, prinsip-prinsip perjuangan partai, strategi implimentasi, dan struktur organisasi
- BAB IV** :pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi ideologi dan pola rekrutmen kader Partai Persatuan Pembangunan.
- BAB V** :pada bab ini berisi penutup, kesimpulan, dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian ideologi

Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk “idea” dan “logos”, yang berasal dari bahasa Yunani “eidos” dan “logos”. Secara sederhana ideologi berarti suatu gagasan berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran falsafah dalam arti luas, istilah “ideologi” dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau di junjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam artian ini, ideologi disebut “terbuka”. Dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia hidup dan bertindak. Dalam artian ini, disebut juga ideologi tertutup. Kata “ideologis” sering juga dijumpai dalam pengeritan memutlakan gagasan tertentu, sifatnya tertutup, dimana teori-teori bersifat pura-pura dengan kebenaran tertentu, tetapi menyembunyikan kepentingan kekuasaan tertentu yang bertentangan dengan teorinya. Dalam hal ini, ideologi diasosiasikan kepada hal yang bersifat negatif.<sup>21</sup>

Ideologi adalah juga diartikan sebagai ajaran, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu pandangan hidup akan meningkat menjadi suatu falsafah hidup apabila telah mendapat landasan berpikir maupun motivasi yang lebih jelas, sedangkan kristalisasinya kemudian membentuk suatu ideologi. Keterikatan ideologi dengan pandangan hidup akan membedakan ideologi suatu kelompok atau bangsa dengan kelompok atau bangsa lain.

Dalam praktik, orang menganut dan mempertahankan ideologi karena memandang ideologi itu sebagai cita-cita, ideologi merumuskan cita-cita hidup. Oleh sebab itu, ideologi dapat dirumuskan seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

---

<sup>21</sup> Syarbaini, Rusdiyanta, Doddy Wihardi, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 157-158.



Oleh karena itu, ideologi merupakan wawasan yang hendak diwujudkan, maka ideologi selalu bersumber dari nilai-nilai falsafah yang mendahuluinya, dan menghubungkannya dengan politik yang menangani dunia nyata yang hendak diubah. Politik juga bisa diterjemahkan sebagai kebijaksanaan menyangkut asas serta dasar bagaimana mewujudkan ideologi itu kedalam kenyataan, khususnya dengan membangun kekuatan yang diperlukan, serta untuk mempergunakan kekuatan itu untuk mencapai tujuan.

## **B. Pengertian Partai Politik**

Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota, negara kota. Dari *polis* berkembang konsep *polites* yang bermakna warga negara dan konsep *politikos* yang berarti kewarga negaraan. Dari penjelasan etimologis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa politik sebagai sesuatu yang berhubungan antara warga negara pada suatu (negara) kota. Sedangkan akar katanya dari bahasa Inggris adalah *politics*, yang bermakna bijaksana. Kalau kita lanjutkan pemahaman etimologis dari dua akar kata dari bahasa yang berbeda tersebut, dari bahasa Inggris maupun Yunani, maka politik dapat dipahami sebagai suatu proses dari sistem penentuan dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan warga negara dalam negara (kota).<sup>22</sup>

Pandangan dari berbagai ahli ilmu politik tentang pengertian politik, yaitu antara lain:<sup>23</sup>

- 1) Harold D. Lasswell (1936), merumuskan batasan politik sebagai “siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”.
- 2) Hans J. Morgenthau (1960), menjelaskan politik sebagai pertarungan untuk memperoleh kekuasaan.
- 3) E. F. Schaattschneider (1960), menemukan politik sebagai seni dan ilmu dari pemerintahan.
- 4) David Easton (1981), menerangkan politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan.
- 5) Carl Schmitt (1976), mendefinisikan politik sebagai konflik murni, antara sini melawan sana.

---

<sup>22</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. ke-3, h. 10.

<sup>23</sup> Ibid, h. 10-11.

- 6) Bernard Crick (1964), mengemukakan politik sebagai penyaluran kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan lewat kebijakan publik.
- 7) Maurice Duverger (1982), melihat bahwa hakikat politik bersifat ambivalen. Di satu sisi politik merupakan konflik untuk meraih kekuasaan, di mana individu atau kelompok yang memegangnya untuk mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat. Sedangkan individu atau kelompok yang berkuasa berusaha untuk menentang bahkan merebutnya. Di sisi lain politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan keterlibatan dan keadilan.
- 8) James A. Caporaso dan David P. Levine (2008), memberi pengertian politik sebagai pemerintahan, publik, dan alokasi nilai oleh pihak yang berwenang.

Dengan pengertian politik seperti yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka politik di pahami sebagai kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict and conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Dalam sistem politik tidak terlepas diri yang namanya partai politik. Partai politik ialah sekumpulan orang-orang yang bercita-cita untuk berbuat negara atau menguasai negara atau menguasai negara dengan cara atau jalan menetapkan anggota-anggotanya di dalam badan-badan negara baik secara legal atau ilegal ataupun subversif atau dengan kudeta atau pemberontakan.<sup>24</sup>

Sacara etimologis kata partai dapat ditelusuri jejaknya dalam bahasa latin, yaitu *partire*, yang bermakna “membagi” atau “minilah” atau juga bisa disejajarkan dengan kata benda “*part*” dalam bahasa Inggris bermakana bagian. Apabila “*part*”

---

<sup>24</sup> Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan Dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 16-17.

dikembangkan menjadi kata kerja berubah jadi “*to participate*”, yang berarti turut ambil bagian. Dari penelusuran etimologis tersebut, partai memiliki makna “memilah” dan “turut ambil bagian”. Dengan pengertian tersebut, partai bisa dipahami sebagai “bagian dari masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan bertujuan.

Jika disandingkan antara makna partai dan politik secara etimologis, maka partai politik dipahami sebagai bagian dari masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan bertujuan kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan publik (public life), pemerintahan (government), negara (state), konflik dan resolusi konflik (conflict and conflict resolution), kebijakan (policy), pengambilan keputusan (decision making), dan pembagian (distribution), atau alokasi (allocation).<sup>25</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>26</sup>

Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Di bagian ini dipaparkan beberapa contoh definisi partai politik menurut para ahli, yaitu:<sup>27</sup>

Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materil.

Sigmund Neumann, dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut: partai politik adalah organisasi aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

---

<sup>25</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, h. 245.

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 403-404.

<sup>27</sup> Ibid, h. 404-405.

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menetapkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Sedangkan ilmuan politik Inggris. Edmund Burke mendefinisikan partai politik kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan di antara mereka untuk kepentingan nasional dengan cara yang sama.

Pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan tentang partai politik sebagaimana dijelaskan dalam point-point dibawah ini.<sup>28</sup>

1. Partai politik adalah organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu sehingga mereka memiliki kepentingan yang harus diperjuangkan melalui kepentingan yang harus diperjuangkan melalui penguasaan struktur dan kekuasaan dalam pemerintahan.
2. Untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, partai politik harus berkonsentrasi dalam arena yang bernama pemilu.
3. Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang dijadikan media untuk mewujudkan kepentingan rakyat, yaitu rasa aman dan nyaman, adil dan sejahtera.

---

<sup>28</sup> Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), h. 8.

4. Partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan membentuk opini masyarakat, membawa pemimpinnya berkuasa di pemerintahan serta mengusahakan para pendukungnya mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.
5. Partai politik memiliki empat karakteristik; (1) organisasi yang berjangka panjang; (2) memiliki struktur organisasi yang berjenjang dan adanya pembagian divisi di setiap masing-masing level; (3) memiliki orientasi kekuasaan sebagai alat untuk mengimplementasikan kepentingan rakyat; dan (4) meraih dukungan suara sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas.
6. Dalam pembentukan partai politik ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur oleh pihak yang berwenang.

### **C. Pengertian Partai Politik Islam**

Pengertian partai politik telah gambaran dijelaskan di atas. Sekarang jika dikaitkan dengan Islam, apa yang dimaksud dengan partai politik Islam? Islam dalam konteks ini dipahami sebagai doktrin agama yang harus diimplementasikan dalam masyarakat serta mengatur seluruh aktivitas dan perilaku manusia didalamnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran bahwa Islam merupakan agama komprehensif yang sudah mengatur segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini. Dengan demikian, partai politik Islam dapat dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif maupun eksekutif. Proses mendapatkan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilu serta melakukan kampanye dengan menjual isu-isu program-program yang tidak lepas dari nilai-nilai ideologi Islam.

Dalam kajian ilmu politik, penggunaan istilah “partai Islam: setidaknya memiliki dua konotasi. *Pertama*, ideologi organisasi, yaitu merujuk kepada partai politik yang menjadikan Islam sebagai dasar idologinya. Ideologi organisatoris

dianggap penting karena ia merupakan tujuan dan orientasi. Ideologi menjadi alat pembeda antara satu partai dengan partai yang lainnya. Dalam pengertian ini, yang termasuk partai Islam di Indonesia antara lain Masyumi, Partai NU, PSII, Parmusi, PPP, PBB, dan PKS. Kedua basis sosio-kultural, dimana partai politik bukan hanya dilihat sebagai organisasi tetapi juga sebagai sarana atau media bagi masyarakat, atau kelompok-kelompok di masyarakat, untuk mengartikulasikan, mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan politiknya. Sehingga, identitas dari sebuah partai bukan hanya pada bentuk organisasinya, namun lebih kepada basis sosio-kultural kelompok masyarakat yang diwakilinya.

Romli membagi partai yang berasaskan Islam ke dalam tiga kategori: (1) Partai Islam yang berasaskan Islam; (2) Partai Islam yang berasas Islam dan Pancasila; Partai Islam yang berasaskan Pancasila tetapi berbasis massa mayoritas dari kalangan Islam.<sup>29</sup>

### **1. Prinsip Partai Islam**

Prinsip adalah sesuatu hal yang dipegang teguh dan dijadikan oleh partai Islam yang mendasari segala aktivitas keorganisasian. Sebagai partai yang menggunakan label dan atribut Islam serta mewakili kepentingan kaum Muslim, partai Islam harus mendasarkan seluruh program dan kegiatan organisasinya ada prinsip-prinsip berikut ini.<sup>30</sup>

- a. Berpedoman pada nilai-nilai universal Al-Quran dan As-Sunnah. Segala keputusan organisasi tidak boleh bertentangan dengan sumber ajaran utama Islam yaitu kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua ajaran sumber ajaran Islam tersebut membuat nilai-nilai universal yang mencakup segala kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena itu, partai Islam harus berdasarkan segala aktivitas kepartain pada nilai-nilai universal kedua sumber ajaran Islam tersebut.

---

<sup>29</sup> Ibid, h. 8-9.

<sup>30</sup> Ibid, h. 9-10.

- b. Musyawarah. Setiap keputusan-keputusan organisasi harus melalui kordinasi dan komunikasih dengan segenap pengurus yang memiliki wewenang. Dengan proses kordinasi tersebut, partai akan mendapatkan banyak pertimbangan dari beragam pihak sehingga melahirkan keputusan yang bijak dan tidak terkesan terburu-buru. Dengan proses musyawarah pula, kebesaran organisasi akan didukung oleh banyak pihak yang memiliki kekuatan besar. Musyawrah mengidinkasikan anti otoritarisme dan anti kediktatoran. Karena itu, partai Islam harus bersifat kolektif-kolegial dimana setiap kebijakan harus diputuskan secara bersama-sama.
- c. Belaku adil, setiap pimpinan dan anggota memiliki hak yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing partai. Karena itu, partai harus membuat keputusan yang adil untuk sebuah keputusan sehingga tidak merugikan pihak yang lain. Artinya, meskipun pada akhirnya sebuah keputusan tersebut akan merugikan pihak lain, tetapi keputusan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan berpihak pada mereka yang tertindas.
- d. Mengahargai perbedaan dan bukan perpecahan. Perbedaan dalam fitrah setiap manusia dan merupakan anugerah dari yang Maha Kuasa. Dengan perbedaan pula kehidupan menjadi indah dan beragam. Namun, perbedaan itu harus dikelola dengan baik dan bukan malah menimbulkan perpecahan. Perbedaan harus diatur dengan sedemikian rapi sehingga menciptakan perpaduan yang saling terkait satu sama lain dan bukan perpecahan yang bisa berdampak pada perang dan pertumbuhan darah. Islam tidak megajarkan perpecahan yang mendapak pada rusaknya iman dan moral umat manusia.

## **2. Tujuan Dan Fungsi Partai Islam**

Sebagai representasi dari perjuangan Islam, partai politik Islam harus memiliki tujuan sebagai seperti gerakannya. Tentunya, tujuan dari partai politik Islam

tidak terlepas dari keberadaan sebuah Institusi negara sebagai media bagi partai Islam untuk mewujudkan cita-cita besar Islam.

Adapun tujuan partai Islam dapat dirumuskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi: *Baldatun thayyibatun warabubun ghafur* yang artinya terwujudnya sebuah negara yang terdiri atas masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang diridahi oleh Allah SWT. Dari tujuan ini dapat dirumuskan tiga tujuan utama partai Islam.<sup>31</sup>

- a. Masyarakat yang adil. Keadaan di mana seluruh masyarakat di suatu negara tidak ada yang merasa terintimidasi maupun terpinggirkan dari kehidupan masyarakat luas serta mendapatkan hak-haknya sebagai salah seorang warga yang mendiami suatu daerah tertentu. Keadilan meliputi segala hal yang melekat pada mereka seperti, hak hidup, hak mendapatkan keamanan, hak berbicara, dan lain sebagainya.
- b. Masyarakat yang makmur dan sejahtera. Setiap manusia menginginkan hidup bahagia. Salah satu indikator hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Makmur mengindikasikan kehidupan seorang sudah cukup dari segi materi dan sejahtera mengindikasikan bahagianya seseorang tidak hanya dari segi materi tetapi juga dari segi psikis, misalnya bahagia berada lingkungan keluarga yang peduli dan perhatian terhadap mereka.
- c. Masyarakat yang aman dan nyaman. Salah satu fungsi negara adalah membuat warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tindakan kriminal lainnya. Sedangkan nyaman adalah rasa bahagia dari segi psikologis seorang yang hidup dalam lingkungan tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai Islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari segala bentuk kejahatan maupun gangguan masyarakat sekitar.

---

<sup>31</sup> Ibid, h. 10-11



## **D. Fungsi Partai Politik**

Fungsi partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.

### **1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik**

Partai politik memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah.

Peran partai sebagai jembatan sangat penting, kerana di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.<sup>32</sup>

Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.

Menurut Singmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Komunikasi politik, idealnya, dilakukan berkesinambungan dan holistik. Partai politik mengomunikasikan politik sepanjang masa. Partai politik, oleh karena itu, tidak pernah putus melakukan komunikasi politik. Keterputusan partai politik mengomunikasikan politik akan menyebabkan suatu keadaan hampa (*vacuum*)

---

<sup>32</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 406.

informasi politik. Dalam konteks inilah, suatu partai selalu memanfaatkan berbagai momen sehingga tidak terjadi kehampaan informasi politik pada khalayak. Momen yang sering dimanfaatkan oleh partai politik seperti ulang tahun partai politik, musyawarah partai politik, dan tanggapan partai politik terhadap suatu keadaan atau situasi.

Pada saat ulang tahun dan musyawarah, partai politik sering mengomunikasikan politik pada khalayak. Selain itu, tidak jarang partai politik melakukan komunikasi politik pada saat terdapat suatu keadaan atau situasi dimana partai politik harus menentukan sikap terhadap keadaan atau situasi tersebut. Misalnya ketika masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kasus Bank Century, maka berbagai partai politik menjelaskan sikap dan posisi partai terhadap suatu kasus tersebut.<sup>33</sup>

Partai politik merupakan salah satu instrumen untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, menegakkan keadilan dan mencegah dari yang munkar dalam rangka memperjuangkan terwujudnya cita-cita, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisaa: 135.<sup>34</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن

يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin

<sup>33</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, h. 248.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung, PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016).

*menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*

Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintahan kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi (komunikasi) dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan kedalam bahasa yang dipahami masyarakat. Sebaliknya, segala aspirasi, keluhan dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dipahami oleh pemerintah. Jadi, proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.<sup>35</sup>

## **2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik**

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.<sup>36</sup>

M. Rush, sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.

Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai politik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

---

<sup>35</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 120.

<sup>36</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 407.

Sosialisai politik merupakan kegiatan yang berbiaya tinggi, karena untuk melaksanakan pengumpulan massa, menarik masa untuk berkumpul dan membujuk masa untuk betah menerima nilai dan pandangan partai harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Akibatnya, masyarakat melihat partai politik tidak beda dengan perusahaan yaitu sama-sama memiliki tujuan “ membeli dengan harga sangat murah, tapi menjual dengan harga yang sangat tinggi” atau dengan modal sangat rendah untuk meraih keuntungan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, partai dipandang sebagai perusahaan pembeli “suara rakyat” dengan semurah mungkin dan menjual “suara partai” melalui anggota dewannya kepada siapa yang membutuhkan, seperti individual yang ingin menduduki jabatan publik (anggota Mahkamah Agung, Mahkama Konstitusi, Deputy Bank Indonesia, dan sebagainya) semahal mungkin.

Oleh sebab itu sukar diramalkan kemengan suatu partai politik pada suatu daerah pemilihan dikarenakan visi, misi, tujuan, *platform*, agenda dan program, namun tidak susah melihat kemampuan partai membeli suara yang piawai berkorelasi dengan perolehan suara partai tersebut, dengan memahami cara fikir masyarakat seperti itu, maka bisa dipahami mengapa partai politik tidak melakukan sosialisasi politik. Sebab massa menganggap semua partai sama, yang berbeda adalah jumlah uang yang diterima pada saat kampanye atau menjelang hari pencontrengan.<sup>37</sup>

### **3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik**

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang lebih baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

---

<sup>37</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, h. 250.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikan organisasi-organisasi massa (sebagai *onderbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, ataupun cara-cara lain.<sup>38</sup>

Melalui partai politik dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan. Calon-calon tersebut nantinya akan dipilih oleh rakyat selain itu, kepala pemerintahan baik pusat maupun daerah juga dipilih dengan rekrutmen dan seleksi melalui partai politik, baik yang berasal dari partai itu sendiri maupun dari pihak ketiga.<sup>39</sup>

#### **4. Sebagai Sarana Kendaraan Politik**

Kendaraan politik menunjukkan suatu proses dimana seseorang melakukan, suatu perjalanan politik, ingin bersaing untuk mendapatkan jabatan politik seperti gubernur, bupati, yang membutuhkan suatu kendaraan. Kendaraan tersebut berupa partai politik yang memiliki representasinya diparlemen. Dalam fenomena perpolitikan di Indonesia terdapat dua jenis kendaraan politik yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan sewa. Kendaraan pribadi merupakan partai politik yang hanya bisa digunakan oleh anggota atau kader partai politik itu sendiri. Jika ingin dipakai, maka kendaraan tersebut disinergikan dengan kendaraan lain sehingga kendaraan yang ada bisa digunakan secara utuh untuk menuju persaingan merebut posisi jabatan gubernur, bupati atau wali kota.

Selain fungsi diatas, secara sosial ada beberapa fungsi partai politik yaitu:

---

<sup>38</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 408-409.

<sup>39</sup> Muhammad Ali Safaat, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 68.

### **a. Partai politik sebagai agen sosial**

Dalam sistem politik seperti sekarang ini, peranan partai politik menjadi sangat vital. Kader-kader partai politiklah yang banyak mewarnai kebijakan melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam legislatif maupun eksekutif. Meskipun terdapat wakil-wakil non-partai dalam parlemen seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetap saja wakil partai yang mayoritas dan memegang peran utama dalam penyusunan undang-undang begitu juga kalau kita lihat dalam bagian eksekutif, proporsi menteri-menteri yang berasal dari partai politik dibandingkan dengan yang non-partai juga menunjukkan bahwa wakil partai politik yang mayoritas. Kalau kita menyadari bahwa kontribusi partai politik untuk menempatkan orang-orangnya dalam sistem legislatif dan pemerintahan begitu besar, maka kualitas keputusan dan kebijakan yang akan diambil juga akan sangat tergantung pada kualitas wakil-wakil partai politik yang duduk didalamnya. Ketika kualitas orang yang duduk dalam suatu jabatan melalui seleksi yang ketat dalam partai, dapat diharapkan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil pun akan berkualitas. Namun, begitu juga sebaliknya, apabila orang-orang partai politik yang duduk dalam jabatan tersebut bukanlah orang yang berkualitas, sudah dapat dipastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang mereka tetapkan tidak berkualitas.

Partai politik tidak hanya sebatas kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Dengan begitu besarnya akses yang dimiliki partai politik, muncul juga tanggung jawab sosial yang dimiliki partai politik, muncul juga tanggung jawab sosial yang harus diemban. Orang-orang yang masuk ke suatu partai politik diharapkan tidak hanya memfokuskan diri mereka pada cara mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan hanyalah *tools* dan instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah penciptaan kondisi yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pihak-pihak yang terfokus pada upaya merebut kekuasaan semata tanpa melihat realitas bahwa sebenarnya kekuasaan hanyalah instrumen kerab kali akan terjebak fanatisme yang berlebihan. Anggapan

bahwa tujuan akhir adalah kekuasaan akan menutup kemungkinan bahwa ideologi lain juga dapat berkontribusi bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Mengingat perannya yang begitu besar, tidak mengherankan apabila dituntut tanggung jawab partai yang besar juga. Partai politik semakin dituntut sebagai agen sosial yang berperan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu dalam berpolitik dewasa ini diperlukan perubahan paradigma yang menjadikan partai politik lebih sebagai pelayan publik, agen pembaharuan, dan harapan sosial. Dalam berdemokrasi, partai dan elite politik perlu menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab politik, atas apa saja yang mereka nyatakan dan lakukan. Setiap ucapan dan aktifitas politik akan berdampak tidak hanya bagi individu dan komunitasnya saja, tetapi juga berimplikasi kepada penciptaan situasi dan kondisi nasional.

Konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat, kerap kali merupakan dampak dari konflik yang terjadi ditingkat elite politik. Dengan demikian mendapatkan posisi elite politik perlu menyadari bahwa dipundaknya terdapat tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketidaknyamanan elite politik tentunya akan berdampak pada konflik ditingkat para pendukung ditingkat akar rumput.<sup>40</sup>

#### **b. Partai politik sebagai pelayan publik**

Partai politik harus dilihat sebagai entitas yang dibebani kewajiban untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui perjuangan ideologi mereka yang tercermin dalam program kerja mereka dan *platform* partai. Sudah saatnya partai politik turan gunung dan lebih mendekati diri pada anggota masyarakat yang mereka wakili maupun seluruh masyarakat pada umumnya. Eksistensi partai politik tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat. Karena dari masyarakatlah partai politik dilahirkan. Karena ikatan ideologi dan upaya memperjuangkan tujuan sekelompok masyarakatlah partai politik

---

<sup>40</sup> Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), Cek. Ke-3, h. 70-72.

didirikan. Jadi setelah berhasil berdiri, suatu partai diharapkan tidak meninggalkan masyarakatnya. Disisi lainnya, meninggalkan masyarakat justru akan membuat suatu partai politik teralienasi dari komunitas dimana partai tersebut dibesarkan. Memang harus diakui tentang sangat tingginya godaan yang berkuasa. Tapi, sikap politik semacam ini niscaya akan mengakibatkan partai atau individu bersangkutan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Tidak mengherankan juga apabila muncul konflik internal dalam suatu partai politik sebagai akibat aliansi dengan yang berkuasa ini.

Menjadi pelayan publik berarti bahwa keberadaan partai politik dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas, bangsa, dan negara. Hal-hal yang akan dilakukan oleh partai politik harus berorientasi pada perbaikan kondisi sosial masyarakat, dan tidak hanya terfokus pada apa yang dirasakan benar oleh partai politik tersebut. Partai politik harus selalu hadir untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah masalah yang dihadapi publik. Selalu tampil didepan akan memberikan *image* yang positif terhadap partai politik bersangkutan. Hal ini akan menghasilkan tingginya dukungan masyarakat terhadapnya.

Sementara itu, partai politik yang sekedar mengejar tujuan dan kepentingan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat menilainya sebagai partai yang tidak peduli atas keadaan mereka. Akibatnya dukungan mereka kepada partai politik tersebut akan semakin berkurang. Menjadi pelayan berarti harus memiliki kesadaran bahwa partai politik adalah rumah bagi semua orang yang ingin mendapatkan pelayanan.<sup>41</sup>

### **c. Partai politik sebagai agen pembaharuan**

Partai politik juga dituntut untuk tidak semat-mata mengikuti apa yang dimau masyarakat. Lebih dari itu, partai politik diharapkan memiliki visi dan tujuan jangka panjang yang jelas tentang mau dibawa kemana rakyat dan mau dibawa kemanakah bangsa serta negara dikembangkan. Tanpa adanya *blueprint* yang jelas membuat suatu partai politik terombang-ambing dengan mengikuti arus yang berkembang

---

<sup>41</sup> Ibid, h. 72-74.



belaka. Yang paling mengkhawatirkan, partai politik macam ini tidak mengetahui kearahmanakah perkembangan itu berakhir. Untuk itu harus ada visi dan tujuan jangka panjang yang jelas, sehingga memberikan arahan dan petunjuk tentang mau kemana partai politik berevolusi dan bagaimana peran serta kontribusinya di dalam masyarakat secara keseluruhan.

Namun memiliki visi dan tujuan jangka panjang yang jelas saja masih belum cukup. Partai politik juga harus juga menjadi agen pembaharuan. Partai politik harus memiliki kemampuan untuk merealisasikan terobosan ide dan gagasan mereka dalam masyarakat. Partai politik dituntut untuk selalu memikirkan inovasi yang tiada henti guna mencari pemecahan permasalahan yang dihadapi. Partai politik harus mampu menjadi motor pergerakan utama dalam perubahan sosial.

Ketika terdapat ketidak beresan dalam masyarakat, partai politik dituntut untuk dapat memperbaikinya dan berada digaris depan untuk membuka jalan ke arah yang lebih baik. Hal ini membawa implikasi bahwa partai politik harus memiliki kesadaran yang selangkah lebih maju dibandingkan dengan masyarakat. Partai politik harus memiliki kemampuan analisis yang baik terhadap situasi yang berkembang dalam masyarakat sehingga kedepan dapat memperkirakan apa yang akan terjadi dan bagaimana langkah antisipasinya terhadap situasi yang berkembang saat ini.<sup>42</sup>

#### **d. Partai politik sebagai harapan sosial**

Dengan melihat apa yang dapat dilakukan partai politik untuk memenuhi kebijakan publik, sangat wajar kalau harapan yang diberikan masyarakat kepada partai politik sangat besar. Masyarakat berharap kalau partai politik dapat membawa perbaikan kepada masyarakat. Beban yang diberikan masyarakat kepada partai politik semakin tinggi. Partai politik lebih dituntut untuk berorientasi kebangsaan ketimbang hanya mengejar target dan kepentingan partai hanyalah media untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran bangsa. Masyarakat berharap bahwa partai politik mampu untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, dan bukannya malahan menjadi sumber masalah itu sendiri.

---

<sup>42</sup> Ibid, h. 74.

Partai politik harus menyadari bahwa hal ini. Bahwa dibalik akses dan peran dan peran yang besar diembannya, muncul harapan yang dibebankan kepada mereka. Cara melakukan seleksi terhadap orang-orang yang menjadi pengurus partai politik harus diubah dan lebih berorientasi pada masalah bangsa dan negara. Selain itu proses pengkaderan dan muatan-muatan politis yang diberikan kepada mereka pun harus diubah. Perlu ditanamkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian bangsa serta negara, dan bahwa dipundak mereka terdapat segudang permasalahan bangsa dan negara yang harus diselesaikan. Partai politik bukanlah tempat mencari uang dan materi.

Partai politik adalah entitas yang memiliki peran besar dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Hal ini harus diutamakan pada kader-kader partai politik agar mereka tidak mengejar target semu yaitu semata-mata mengejar kekuasaan dan menjadi kaya setelah berhasil dipartainya. Walaupun memang harus diakui bahwa upaya menjadi kaya melalui politik masih banyak dilakukan. Kenyataan ini harus semakin disingkirkan apalagi kalau orang-orang yang memiliki tujuan kaya itu adalah orang-orang yang sebenarnya sudah “sangat kaya”. Harus diingat bahwa politik bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat.<sup>43</sup>

Di Indonesia fungsi partai politik juga di atur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Pasal 12 yakni menjadi sarana untuk :<sup>44</sup>

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Pencipta iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterahkan masyarakat.
- c. Penyerap, Penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan.

---

<sup>43</sup> Ibid, h. 75.

<sup>44</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep Teori Dan Starategi*, h. 214.

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

#### **E. Tujuan Partai Politik**

Dalam Undang-Undang N0. 2 Tahun 2008 Pasal 10 dinyatakan bahwa tujuan partai politik di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

##### **1. Tujuan Umum Partai Politik**

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Menjaga dan melahirkan keutuhan Negara Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### **2. Tujuan Khusus Partai Politik**

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **F. Ideologi Dan Partai Politik**

Masing-masing partai politik akan mengusung ideologi yang berbeda dengan suatu yang lain. Dalam hal ini ideologi dapat berupa metode dan tujuan akhir yang ingin diperjuangkan oleh partai politik. Ideologi sosialis memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan ideologi kapitalis. Tujuan yang ingin dicapai oleh ideologi sosialis adalah masyarakat yang merata kesejahteraannya, sebaliknya ideologi

---

<sup>45</sup> Ibid, h. 213.

kapitalis ingin menciptakan kemakmuran dan kekayaan sebesar-besarnya. Selain itu, cara pencapaian yang dipakai keduanya juga secara signifikan sangat berbeda. Ideologi sosialis lebih menekankan pada aspek pemerataan dan intervensi negara, sementara ideologi kapitalis lebih menekankan aspek kebebasan dan non-intervensi negara terhadap aktivitas ekonomi.

Struktur ideologi pemilih sangat menentukan partai apa dan konsestan seperti apa yang menurut mereka akan menyuarakan suara mereka. Pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih partai atau konsestan yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka, dari pada partai politik atau konsestan yang memiliki ideologi yang berbeda. Terdapat beberapa hal yang dapat digunakan oleh partai politik dalam hal ini. Pertama, partai politik berusaha menarik masyarakat yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka. Kedua, partai politik berusaha memperkenalkan dan meyakinkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesamaan ideologi dengan mereka.<sup>46</sup>

Ideologi dianggap sebagai faktor utama bagi pemilih dalam menentukan partai yang akan dipilih dan sekaligus bisa berevolusi seiring dengan perjalanan waktu. Di satu sisi, peran partai politik memiliki dan seorang kontestan mungkin saja mencoba meyakinkan pemilih dari kalangan yang seluas mungkin, sehingga para pemilih merasa bahwa ideologi kontestan itu sama dengan ideologi mereka. Di sisi lain, pemilih memiliki sistem nilai dan keyakinan, yang menjadi petunjuk untuk menilai partai politik atau kontestan mana yang memiliki kesamaan dengan ideologi mereka.

Perlu dicatat, bahwa di Indonesia terdapat banyak partai politik yang sesungguhnya memiliki ideologi yang sama, misalnya kelompok nasionalis seperti yang diwakili oleh partai-partai besar seperti PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar, sedangkan partai yang bernafaskan Islam terutama diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera dan PPP, Partai besar lain seperti PKB dan PAN sesungguhnya terletak diantara kedua ideologi itu. Kedua partai terakhir ini mengklaim sebagai partai nasionalis, tetapi basis mereka adalah dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni PKB berbasis NU, dan PAN berbasis Muhammadiyah. Gejala di Indonesia ini

---

<sup>46</sup> Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Permasalahan Dan Realitas*, h. 106-107

mungkin menarik untuk disimak, karena dari banyaknya jumlah partai dengan ideologi yang sesungguhnya sama, lalu apakah yang mendorong berdirinya begitu banyak partai? Tentunya saja harus diakui pada zaman ini mendirikan partai tidak semata-mata dilandaskan oleh ideologi tertentu. Sebagai contoh besarnya adalah Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam itu hanya ada dua partai yang bisa dibilng berideologikan sama, Partai Republik dan Partai Demokrat. Yang membedakan keduanya hanyalah program kerja dan *image*.

Tampaknya, berdirinya banyak partai di Indonesia lebih didorong oleh upaya merebut kekuasaan. Mereka lebih mempergunakan ideologi sebagai cantolan. Hal ini bisa dilihat pada gejala yang ada pada PKB dan PAN. Meski berbasisi Islam, kedua partai ini mengklaim sebagai partai nasionalis. Rupanya mereka ingin menarik suara dari kalangan non-Islam juga. Sedangkan partai-partai nasionalis juga masih kerap mempergunakan ajaran Islam sebagai bahan kampanye, atau merangkul para ulama Islam untuk merebut suara ormas Islam. Orientasi Ideologi di Indonesia nampaknya masih sangat kuat. Tapi hal ini tidak menjadi masalah, karena apapun ideologinya, masyarakat telah menjadi semakin kritis untuk lebih memperhatikan kinerja masing-masing partai dan kandidat ketimbang ikatan ideologis. Meskipun tentu saja masih banyak pula kalangan yang bersikap ‘sangat keras’ dalam ideologi.

## **BAB III**

### **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

#### **A. PROFIL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

##### **1. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan**

Pendirian partai politik didasarkan pada adanya maklumat wakil presiden Moh. Hatta 3 Desember 1945 mengenai pendirian partai politik. Hal ini di dukung adanya UUD 1945 pasal 28 yang memberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, di mana dengan adanya pasal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan yuridis untuk kemerdekaan serikat dan berkumpul tersebut merupakan pengakuan terhadap keberadaan partai-partai politik. Sejak keluarnya maklumat pemerintah tersebut setiap kelompok masyarakat di Indonesia berlomba-lomba untuk mendirikan partai politik.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan hasil fusi politik dari empat partai Islam, yaitu Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan partai penerus estafet dari empat partai Islam dan wilayah penyelamat dan aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggun jawab tokoh-tokoh umat Islam dan pimpinan partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt melalui perjuangan politik.

##### **2. Partai Persatuan Pembangunan**

###### **a. Visi Partai Persatuan Pembangunan**

Terwujudnya masyarakat yang betakwa kepada Allah Swt dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi

hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan social yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.

b. Misi Partai Persatuan Pembangunan

- PPP berkhitmat untuk berjuang dalam mengwujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama Muslim).
- PPP berkhitmat untuk memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam dengan mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama Muslim).
- PPP berkhitmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sebangsa).
- PPP berkhitmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
- PPP berkhitmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Swt, *baladatan thoyyibatun wa rabbun ghofur*.

c. Enam Prinsip Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan

- Prinsip ibadah: PPP senantiasa berupaya mendasari perjuangan dengan prinsip ibadah, dalam arti yang seleuas-luasnya yaitu mencapai kerhidoan Allah Swt. Oleh karena itu semua kegiatan perpolitikan jajaran partai adalah merupakan kerterpanggilan untuk beribadah.

- Prinsip amar ma'ruf nahi munkar: PPP mendasai perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong pelaksanaan perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang mencele.
- Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan: perjuangan PPP selalu didasarkan kepada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan partai mengarah kepada perlawanan terhadap kebatilan karena kebenaran berhadapan secara diametrical dengan kebatilan meskipun begitu kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Swt. Oleh karena itu sepanjang kebenaran itu masih manusiawi kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun. Sementara itu prinsip kejujuran atau amanah bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini perjuangan dalam bentuk apapun akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian dan ketentaman.
- Prinsip musyawarah: PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat terpelihara sikap saling pengertian, saling menghargai dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Kemudian disamping itu keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan secara moral pada Allah Swt. Apabila dengan musyawarah tidak mencapai mufakat maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan ditempuh dengan suara terbanyak agar mencegah munculnya diktator mayoritas.
- Prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan: PPP mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan manusia dihadapan Allah Swt. Ini adalah keyakinan yang mendasar yang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran partai sehingga terhindar dari bahaya



kultur individu dan neopeodalisme yang dapat memerosokkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat secara profesional sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggal atau dikucilkan.

- Prinsip istiqomah: PPP menjadikan prinsip istiqomah atau konsisten sebagai prinsip perjuangan. Artinya PPP sebagai institusi dan kader kadernya harus gigih, kokoh, teguh pendirian dan selalu konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Atas dasar istiqomah sebagai nilai dasar perjuangan partai, maka keberhasilan akan dapat ditegakkan dan kemantapan dalam perjuangan partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional.

d. Lambang Partai Persatuan Pembangunan

Lambang Partai Persatuan Pembangunan berupa gambar Ka'bah dengan latar berwarna hijau di dalam bingkai bujur sangkar berwarna emas.

Makna secara umum: Ka'bah adalah symbol pemersatu umat Islam. Ka'bah merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah Swt, serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan.

Partai Persatuan Pembangunan adalah cerminan persatuan melalui penggabungan atau fusi dari empat partai politik Islam peserta pemilu 1971, yaitu partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Persatuan Tarbiyah (Perti), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Dalam naskah deklarasi pembentukan Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh K.H. Idham Khalid (NU), H.M.S. Mintraredja (Parmusi), H. Anwar Tjokroaminoto (PSII), Rusli Halil (Perti), dan K.H. Masykur (NU), dikatakan bahwa kelahiran Partai Persatuan Pembangunan merupakan wadah penyelamat aspirasi umat Islam dan

cerminan kesadaran serta tanggung jawab tokoh-tokoh umat dan pemimpin partai untuk bersatu, bahu membahu, serta membina masyarakat agar dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, melalui perjuangan partai politik.

Partai Persatuan Pembangunan yang berlandaskan Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuan untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat yang diridhai Allah Swt dalam wadah Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

### **3. Strategi Implementasi**

Untuk melaksanakan seluruh program perjuangan PPP, diperlukan strategi implementasi yang sesuai dengan kondisi objektif di lapangan dan kecenderungan perkembangan kedepan. Oleh karena itu diperlukan beberapa langkah strategis yang perlu dijadikan acuan, antara alin:

- a. Yang dimaksud disini adalah penyiapan perangkat-perangkat organisasi partai dalam instrumen dan saran gerak partai dalam mencapai tujuan. Dalam konteks ini diupayakan maksimal peran dan tugas kelembagaan partai seperti fraksi, majelis-majelis, lembaga-lembaga, dan badan otonom PPP.
- b. Menentukan Prioritas program  
Yakni kemampuan untuk membuat proyeksi dan kalkulasi tentang program-program prioritas berdasarkan kondisi objektif internal partai dan kecendrungan eksternal partai baik dalam rangka untuk mengembangkan partai maupun peningkatan peran kenegaraan PPP dalam mensikapi dan mengambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- c. Ideologisasi dalam gerakan partai  
Ideologisasi yang dimaksud disini adalah penamaan motivasi dan semangat perjuangan serta internalisasi nilai-nilai perjuangan dalam pelaksanaan program-program partai disemua aspeknya. Dengan ideologi

semua kader dan komponen partai merupakan aparat ideologi partai untuk mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi-misi PPP.

d. Silaturahmi dan model gerakan

PPP harus menjadikan silaturahmi sebagai model gerakan yang dilakukan secara insentif dan berkelanjutan dari struktur atas ke struktur bawah dan sebaliknya, serta kepada kelompok-kelompok masyarakat lain secara horizontal seperti ulama, kalangan pesantren, organisasi masyarakat, LSM, organisasi kepentingan, khususnya dalam rangka membangun jaringan dan basis konstituen demi kepentingan partai.

e. Kepemimpinan dan pola pengendalian pelaksanaan program

PPP harus dikelola dengan prinsip kepemimpinan yang visioner yang mampu membuat kalkulasi dan proyeksi tentang keberhasilan dan pelaksanaan program partai kedepan. Oleh karena itu pemimpin PPP dituntut tanggap dan responsive terhadap perubahan, tren dan dinamika sosial, ekonomi, politik, kebudayaan serta perkembangan global. Dan tidak kalah pentingnya adalah kepemimpinan yang mempunyai integritas dan moralitas politik tinggi, tegas berkarakter, tidak gamang, dan bersikap abu-abu serta piawai dan mampu mengelola momentum politik.

f. Program perjuang PPP akan berhasil apabila dilakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok strategis sesuai dengan bidang-bidang terkait, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi baik di kalangan pemimpin maupun tokoh-tokoh masyarakat serta kaum cendikiawan.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Adapun susunan kepengurusan atau stuktur kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah sebagai berikut:

## **SUSUNAN DAN PERSONALIA**

### **PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH**

### **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA MASA BAKTI 2016-2021**

**Ketua** : **Drs. H. Yurizar Parlagutan Lubis, M. Psi.**

Wakil Ketua Bid. Penguatan Ideologi: Drs. H. Bustami HS, MM.

Wakil Ketua Bid. Pemenang Pemilu : Drs. H. Nuzirwan Bahri Lubis, MSP.

Wakil Ketua Bid. Advokasi Hukum : Nurul Azhar Lubis, SH.

Dan HAM

Wakil Ketua Bid. Organisasi, : H. Usman Effendi Sitorus, S.Ag., MSP.

Keanggotan Dan Kaderisasi

Wakil Ketua Bid. Hubungan Dan : Ir. H. Andi Jaya Matondang, MMA.

Kerjasama Antar Lembaga

Wakil Ketua Bid. Teknologi, : Ir. H. Darianto, M.Sc.

Informasi Dan Hubungan Media

Wakil Ketua Bid. Agama, Dakwah : Abd. Rahim Gea, MA.

Dan Hubungan Antar Ulama

Wakil Ketua Bid. Industri, : Ir. H. Wira Abdi Dasopang, S.Si.,

Perdagangan Dan Industri Kreatif

Wakil Ketua Bid. Pembangunan Desa: H. A. H. Htg, MA.

Wakil Ketua Bid. Pemenang Daerah : Ahmadan Harahap, S.Ag., MSP.

Partai Barat

Wakil Ketua Bid. Pemenang Daerah : Darwin, S.Ag., MSP.

Partai Timur

Wakil Ketua Bid. Pengelolaan ZIS : Dra. Hj. Fitri Siswaningsih

Dan Wakaf

Wakil Ketua Bid. Pembangunan : Drs. H. Basirus Syawal Nasution

Koperasi Dan BMT

Wakil Ketua Bid. Pendidikan : Dr. drg. Suci Erawati, M.Kes.

Wakil Ketua Bid. Kesehatan Dan : Dr. H. Evan Doni, M.Kes.

Kesejahteraan

Wakil Ketua Bid. Pengandaian : T. A. Salahudin DP, S.Ag., MA.

Masyarakat

Wakil Ketua Bid. Ketenagakerjaan : Jon Marsen Saragih, S.Ag., S.Pd.I.

Wakil Ketua Bid. Pemuda Dan : M. Budi Nasution, SH.

Olahraga

Wakil Ketua Bid. Pemberdayaan : Rahmadani Hidayanti Sukatendel, S.Psi.,  
Perempuan Dan Perlindungan Anak M.Kes.

Wakil Ketua Bid. Seni, Budaya Dan : Hj. Wardaty Nasution, BA.

Lembaga Adat

Wakil Ketua Bid. Penanggulangan : Jamyus Silalahi, SE.

Bencana Alam

Wakil Ketua Bid. Pondok Pesantren : Anwar Sajali, M.Pd.

Dan Madrasah

Wakil Ketua Bid. Pengelolaan Aset : Drs. Ali Isjak Dalimunthe, SS., SH.

Partai

Wakil Ketua Bid. Pertanian Dan : Rita Mawarni, CH., SP., MP.

Perikanan

Wakil Ketua Bid. Kewirausahaan : Drs. Muhammad Ilyas AR.

Dan UKM

Wakil Ketua Bid. Lingkungan Hidup : Muhammad Yus Shanty Siregar, ST.

Dan Kehutanan

**Sekretaris : Jafaruddin Harahap, S.Pd., M.Si.**

Wakil Sekretaris Bid. Penguatan : Adnan Bunyung Lubis, SH., MH.

Ideologi

Wakil Sekretaris Bid. Pemenang : Mursal Harahap, S.Ag., M. Kom.I.

Pemilu

Wakil Sekretaris Bid. Advokasi : Muhammad Idris, SH.,MH.

## Hukum Dan HAM

Wakil Sekretaris Bid. Organisasi, : Tazmir Panggabean, SP.

## Keanggotaan Dan Kaderisasi

Wakil Sekretaris Bid. Hubungan Dan: Muhammad Soleh Tanjung, ST.

## Kerjasama Antar Lembaga

Wakil Sekretaris Bid. Teknologi, : Suasana Nikmat Ginting, SHI., MA.

## Informasi Dan Hubungan Media

Wakil Sekretaris Bid. Agama, : Hj. Rawiyah, S.Pd.

## Dakwah Dan Hubungan Antar Ulama

Wakil Sekretaris Bid. Industri, : Siti Nurbaya, S. Ag., S.Pd.

## Perdagangan Dan Industri Kreatif

Wakil Sekretaris Bid. Pembangunan : Hasan Basri, S.Th.I.

## Desa

Wakil Sekretaris Bid. Pemenang : H. Abdul Aziz Tarigan, Lc., MA.

## Daerah Partai Barat

Wakil Sekretaris Bid. Pemenang : Mardianto, S.Pd.I.

## Daerah Partai Timur

Wakil Sekretaris Bid. Pengelolaan : Muhammad Iqbal Daulay, MA.

## ZIS Dan Wakaf

Wakil Sekretaris Bid. Pengembangan: Hj. Zuraida Janin, BA.

Koperasi Dan BMT

Wakil Sekretaris Bid. Pendidikan : Nurmaida Irawani Srg, S.Psi., M.Psi.

Wakil Sekretaris Bid. Kesehatan : Yasmine Shopia Lubis

Dan Kesejahteraan

Wakil Sekretaris Bid. Pengabdian : Dra. Hj. Nurhayati Zein, M.Pd.

Masyarakat

Wakil Sekretaris Bid. : Ir. Sahman Hutagaol

Ketenagakerjaan

Wakil Sekretaris Bid. Pemuda Dan : Akhyar Adlani Siregar, SHI.

Olahraga

Wakil Sekretaris Bid. Pemberdayaan : Hj. Cut Betty, SH.

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Wakil Sekretaris Bid. Seni, Budaya : Lodiana Ayu, S.Psi., M.Psi.

Dan Lembaga Adat

Wakil Sekretaris Bid. : Syawaluddin Gultom

Penanggulangan Bencana Alam

Wakil Sekretaris Bid. Pondok : Muhammad Haikal El Kahfi

Pesantren Dan Madrasah



Wakil Sekretaris Bid. Pengelolaan : Rika Ramadhani, SH.

Aset Partai

Wakil Sekretaris Bid. Pertanian Dan : Ir. Suryawati Hamzah, MS.

Perikanan

Wakil Sekretaris Bid. Kewirausahaan: Elvi Mahalli, Amd.

Dan UKM

Wakil Sekretaris Bid. Lingkungan : Drs. Ali Bahran Siregar

Hidup Dan Kehutanan

**Bendahara : Jonson Sihaloho**

Wakil Bendahara : Ikhwan Lubis, SE.

Wakil Bendahara : Hj. Sakinah Abdat, MBA.

Wakil Bendahara : Dra. Hj. Jumaiyah

## **SUSUNAN DAN PERSONALIA**

### **PIMPINAN MAJELIS SYARIAH DEWAN PIMPINAN WILAYAH**

#### **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

#### **PROVINSI SUMATERA UTARA MASA BAKTI 2016-2021**

**Ketua** : **Drs. H. Muhammad Hafid Islamil**

Wakil Ketua : KH. Asnan Ritonga, Lc.

Wakil Ketua : KH. Abdul Baits Nasution, Lc.

Wakil Ketua : Dr. Taslim Tanjung, M.Ed.

Wakil Ketua : H. Yahya Indra

Wakil Ketua : H. Rizal Syamsuddin, Lc., MA.

**Sekretaris** : **Dr. H. Nuhung Sulaiman**

Wakil Sekretaris : H. Muhammad Mardiansyah, Lc.

Wakil Sekretaris : Drs. H. Khaidir Lubis

Wakil Sekretaris : H. Khairul Hamdi Jalaluddin AM, Lc.

Wakil Sekretaris : H. A. Syaukani Gayo, MA.

Wakil Sekretaris : H. Nano Wahyuni, Lc.

## **SUSUNAN DAN PERSONALIA**

### **PIMPINAN MAJELIS PERTIMBANGAN DEWAN PIMPINANWILAYAH**

#### **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

#### **PROVINSI SUMATERA UTARA MASA BAKTI 2016-2021**

<b>Ketua</b>	<b>: H. M. Yusuf Siregar</b>
Wakil Ketua	: Drs. H. Hasaiddin Daulay
Wakil Ketua	: H. Syahrums HH.
Wakil Ketua	: Hj. Yusnidar Harahap
Wakil Ketua	: H. Ghazali Syam
Wakil Ketua	: H. Syrwan Hazly Nasution
Wakil Ketua	: Dra. Hj. Derliana Siregar
<b>Sekretaris</b>	<b>: Drs. H. Makmur Ritonga</b>
Wakil Sekretaris	: H. Hasmin Marpaung
Wakil Sekretaris	: H. Hasbillah
Wakil Sekretaris	: Drs. Selamat Riadi
Wakil Sekretaris	: H. Hasanuddin, SH.
Wakil Sekretaris	: H. Ibnu Hajar
Wakil Sekretaris	: Nasrullah

## **SUSUNAN DAN PERSONALIA**

### **PIMPINAN MAJELIS PAKAR DEWAN PIMPINAN WILAYAH**

#### **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

#### **PROVINSI SUMATERA UTARA MASA BAKTI 2016-2021**

<b>Ketua</b>	<b>: H. Nahar Alang Gani, Lc., MA.</b>
Wakil Ketua	: Apriandi Gunawan, SS.
Wakil Ketua	: Drs. Mahmud Lubis
Wakil Ketua	: Ir. H. Ahmad Parlindungan Batubara, M.Si.
Wakil Ketua	: Baheran, HS., SE., MM., MH.
Wakil Ketua	: F Dat Darussalam, MA.
Wakil Ketua	: Samio, MS., Msi.
Wakil Ketua	: Drs. Zulfan Effendi Nasution, M.Si.
Wakil Ketua	: H. Suheri Pohan, SE., M.Si.
Wakil Ketua	: Drs. H. Hasanuddin, MA.
Wakil Ketua	: H. Alifdin Sihotang
<b>Sekretaris</b>	<b>: H. Sultoni Trikusuma, MA.</b>
Wakil Sekretaris	: Mukmin Pohan, SE., M.Si.
Wakil Sekretaris	: Hasbih, SH.
Wakil Sekretaris	: Ikhsan Abdullah, SE., M.Si.

Wakil Sekretaris : Ir. Syafruddin, MM.  
Wakil Sekretaris : Nursarianto, S.Ag.  
Wakil Sekretaris : Hj. Lenny Kawilarang  
Wakil Sekretaris : Dra. Hj. Fatmah  
Wakil Sekretaris : Drs. H. Mardana Nainggolan  
Wakil Sekretaris : Ok. Amiruddin  
Wakil Sekretaris : H. Asmui Nasution  
Wakil Sekretaris : Akhyar Sinaga

## **BAB IV**

### **IDEOLOGI DAN POLA REKRUTMEN DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **A. Ideologi Partai Persatuan Pembangunan**

Suatu pergerakan sudah semestinya selalu didampingi oleh ideologi. Ideologi menjadi faktor sangat penting, karena menentukan identitas dan ruh suatu pergerakan itu sendiri. Demikian pula ketika pergerakan dilembagakan secara formal menjadi sebuah partai politik. Ideologi dalam suatu partai, sejatinya harus menjadi suluh bagi kader-kadernya. Karena kedudukannya yang penting inilah, kita perlu mengetahui ideologi suatu partai agar dapat mengenal jati dirinya, memahami jalan pikir, dan bagaimana kita menyikapinya. Ideologi resmi partai dapat kita ketahui dari apa yang tertulis dalam anggaran dasarnya, akan tetapi sesungguhnya justru dapat kita ketahui dari aktivitas politik yang mereka jalani. Sering kali ideologi tertulis mereka tidak sejalan dengan aktivitas politik mereka.

Dengan ideologi inilah pertarungan gagasan dari partai politik sehingga menjadi *pltafrom* serta isu kemasam untuk mempengaruhi sehingga pemilih nantinya memilih sebuah partai misalnya, dengan ideologi yang dimiliki oleh partai politik maka peningkatan kualitas demokrasi juga akan semakin bagus. Karena dengan ideologi yang muncul dipermukaan publik akan menentukan bagi pemilih, mana kader dari susungan partai politik sesuai dengan harapan pemilih nantinya.

Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang penuh dengan sejarah panjang di pentas perpolitikan tanah air Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lahir dalam suatu masa ketika kebebasan berserikat dan berkumpul terdistorsi secara sistemik oleh kekuasaan Orde Baru. Ketika PPP lahir, jangkar otoritarianisme dan korporatisme negara begitu kuat mencengkeram setiap organisasi politik dan organisasi massa. Partai Persatuan Pembangunan adalah cermin persatuan melalui penggabungan atau fusi dari empat partai politik Islam peserta Pemilu 1971, yaitu

Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).<sup>47</sup> Latar belakang berdirinya partai inilah yang menjadikan Partai Persatuan Pembangunan berideologikan Islam karena partai ini lahir dari gabungan beberapa partai dan organisasi yang berlatar belakangkan Islam.

Pada awal kelahirannya Ideologi partai PPP adalah berasaskan Islam. selanjutnya ideologi PPP berubah. Karena tekanan pemerintahan Orde Baru, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1987, yang mewajibkan seluruh partai-partai dan ormas itu harus berideologikan Pancasila. Pemerintah Orde Baru pada saat itu menyebutnya Pancasila sebagai asas tunggal negara. Seluruh warga negara harus berasaskan pancasila dan tidak boleh ada asas yang lain. Partai Persatuan Pembangunan untuk menyelamatkan hidup dan kelangsungan hidupnya merubah ideologinya Pancasila dan merubah juga lambangnnya menjadi lambang bintang yang digunakan pada pemilu 1987, hal ini berlangsung sampai tahun 1998.

Setelah tumbangnya Orde Baru pada 1998, paket 5 UU politik tahun 1985 dicabut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali ke asas Islam dan kembali menggunakan Ka'bah sebagai logo partai yang sebelumnya bergambar bintang, hal ini diputuskan dalam Mukttamar IV Jakarta mengamanatkan Partai Persatuan Pembangunan kembali berajaskan Islam dan berlambang Ka'bah sebagaimana awal kelahirannya serta menetapkan tujuan partai yaitu untuk mesejahterhakan rakyat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dibawah ridho Allah Swt.

Adapun alasan kembalinya Partai Persatuan Pembangunan ke partai yang berasaskan Islam, serta mengembalikan lambang bergambarkan Ka'bah sebagai lambang partai ialah karena keinginan partai untuk menghapus unsur intervensi yang pernah dilakukan oleh Rezim Orde Baru. PPP berideologikan atau berasaskan Islam dalam artian keindonesiaan yaitu menjaga kesatuan NKRI, menghormati

---

<sup>47</sup> Syamsuddin Haris, *PPP Dan Politik Order Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana ndonesia, 1957), h. 3-4.

kemajemukan, menjunjung nilai-nilai UDD 1945 serta Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Saat ini Partai Persatuan Pembangunan berideologikan Islam atau berasaskan Islam ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terbaru yang dihasilkan pada Mukhtamar Partai Persatuan Pembangunan NO: 07/TAP/MUKHTAMAR VIII/PPP/2016 tahun 2016 pada Bab II pasal 2 yang bertuliskan “PPP berasaskan Islam, dengan bercirikan *Ahlussunah Wal Jama'ah*” yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2016.

Hubungan antara ideologi Pancasila dengan Islam, dapat dilihat ketika proses berdirinya negara ini pertama kali yang dilandasi dari Islam dan Al-Quran, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Karena kemajemukan dan keberagaman warga negara Indonesia, maka pihak-pihak pendiri republik negara ini untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama oleh karena itu Piagam Jakarta dirubah. Jadi antara Islam Dan Pancasila itu tidak dapat di pisahkan, itu erat hubungannya.

Dalam Wawancara dengan bapak Azwan Jaya “Dikarenakan asas PPP adalah Islam yang bermuatan Indonesian maka penerimaan Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah mutlak. Bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan gambaran umum Islam yang bermuatan keindonesiaan. Dengan demikian kolerasi antara asas PPP dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang sama untuk kepentingan NKRI. Beliau menambahkan fungsi Ideologi atau asas dalam partai adalah sebagai pegangan politik bagi setiap kader partai ketika menjalankan aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Bahwa PPP adalah partai Islam, cerminan keislaman itu harus tergambar dari perilaku kadernya. Bila perilaku kadernya buruk, tidak sesuai dengan syariat Islam maka PPP juga akan dipandang buruk oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya.”<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Bapak Azwan Jaya, Tokoh Dan Kader Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Senen, 05 Juni 2017.



Dalam wawancara dengan bapak Jafaruddin Harahap, SPd. Msi. Menyatakan Fungsi ideologi dalam partai ialah untuk memperkuat partai, menyatukan pandangan, melaksanakan ajaran Islam seutuhnya, untuk memperjuangkan kepentingan umat.<sup>49</sup>

## **B. Pola Rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan**

Partai politik memiliki beberapa fungsi, salah satunya ialah sebagai sarana perekturan politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang lebih baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikan organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjangkau dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, ataupun cara-cara lain.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Soleh Tanjung, ST. dan bapak Jafaruddin Harahap, SPd, M.Si. Partai Persatuan Pembangunan tergolong kedalam partai masa dan juga partai kader, selain mengandalkan jumlah anggota

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Dengan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera utara Dengan Bapak Jafaruddin Harahap, SPd., M. Si., (Sekretaris), Jumat, 05 Mei 2017, pukul 17.00-18.00.

<sup>50</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 408-409.

yang besar atau massa, partai ini juga partai kader dimana Partai mengutamakan ketaatan organisasi dan disiplin para anggotanya, tergolong partai kader karena partai ini memiliki sistem pengkaderan yang berjenjang.

Bapak Aswan Jaya menambahkan “Sebenarnya semua partai berbasis kepada kader dan berlandung kepada massa. Dengan demikian tidak bisa dipilah-pilah partai kader atau partai massa. Semua partai melakukan kaderisasi dan semua partai melakukan mobilisasi massa untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. PPP juga demikian, persoalannya apakah proses kaderisasi itu berjalan secara sistematis dan berkesinambungan atau tidak. Bila ia berkesinambungan maka proses pergantian kepemimpinan dan regenerasinya berjalan dengan baik tanpa konflik”.<sup>51</sup>

Pola rekrutmen partai dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara formal dan non formal. Perekrutan secara formal: melalui proses pendidikan/ berjenjang. Kaderisasi melalui struktural partai dan sayap-sayap partai adalah pintu utama dalam proses rekrutmen kader. Pimpinan ranting dan pimpinan anak cabang menjadi struktur yang berdiri di garda terdepan dalam proses rekrutmen itu, karena mereka yang berada di tengah-tengah umat. Kaderisasi dalam bentuk pelatihan-pelatihan diinternal PPP. Jenjang ini dimulai dari bawah terdahulu, yaitu:<sup>52</sup>

1. Pertama penerimaan dan orientasi, yaitu menjelaskan pemahaman kepada calon-calon yang akan dikader itu, apa sebenarnya partai ini apa misi partai ini, mau dibawa kemana partai ini, anggaran dasar partai, ibarat mahasiswa ini adalah masa orientasi, itu ditingkat kecamatan,
2. Selanjutnya ditingkat daerah itu namanya LKKD, latihan kepemimpinan kader dasar. Untuk kader baru yang akan dijadikan pengurus di tingkat ranting dan atau jadi pengurus di sayap-sayap partai. LKKD dilakukan setelah lulus dari tingkat orientasi,

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Azwan Jaya, Tokoh Dan Kader Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Senin, 05 Juni 2017.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Dengan Bapak Muhammad Soleh Tanjung, ST (Wakil Sekretaris Bid. Hubungan Dan Kerjasama Antara Lembaga), Jum'at, 05 Mei 2017, Pukul: 16.00-17.00.

3. baru masuk kepada tingkat wilayah namanya LKKM latihan kader kepemimpinan madya, untuk seluruh pengurus partai di tingkat kecamatan dan cabang
4. Selanjutnya tingkat pusat namanya LKKU latihan kader kepemimpinan utama. untuk pengurus wilayah dan pengurus pusat yang berorientasi kepada persiapan menjadi pimpinan partai ditingkat cabang, wilayah dan pusat.
5. TOT = untuk pengurus harian partai dalam rangka memperbanyak tenaga instruktur/fasilitator yang akan bertugas menjadi pelatih ditingkat pelatihan dan lanjutan.

Adapun materi pangkaderan yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkatan, untuk tahap pertama atau orientasi lebih menjelaskan tentang pengenalan terhadap partai, seperti apa sebenarnya partai ini visi, misi partai anggaran dasar partai, pemahaman arti organisasi, menanamkan loyalitas terhadap organisasi, menetapkan dedikasi, ibaratkan mahasiswa yang melaksanakan masa orientasi. Untuk tingkat selanjutnya materi pengkaderan lebih pendalaman terhadap partai, membuka wawasan berpikir yang berdasarkan ideologi partai, menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi, meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi, mau dibawa kemana partai ini, tanggung jawab sosial, dan seperti materi pengkaderan pada umumnya menanamkan rasa cinta tanah air, untuk tahapan yang lebih tinggi yaitu, membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual, membidik cara berpikir sistematis dan strategis, membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-peristiwa politik dengan cara mengatisipasinya.

Adapun ruang lingkup materi kaderisasi antara lain berkenaan dengan: Pancasila; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; politik praktis; pendidikan politik; ilmu politik; sumber daya manusia; sumber daya alam; cita-cita Partai partai; tanggung jawab sosial dan lainnya. Materi-materi ini terus berubah sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan.

Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tertuang dalam AD/ART pada Bab II Bagian Pertama Persyaratan Pasal 3 yaitu.<sup>53</sup>

- 1) Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa PPP:
  - a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah menikah;
  - b. Menerima dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Khittah dan Program Perjuangan PPP.
- 2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kader PPP:
  - a. memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa PPP;
  - b. Mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang.
- 3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan PPP:
  - a. Berkontribusi nyata untuk membesarkan PPP;
  - b. Sedang atau pernah menjadi pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki visi sejalan dengan PPP;
  - c. Tokoh masyarakat yang dianggap penting untuk menjadi Anggota Kehormatan.
- 4) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan (3) ditetapkan menjadi Anggota dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP dan/atau sertifikat yang ditandatangani Ketua Umum Sekretaris Jendral yang diusulkan oleh Pengurus Harian DPP/DPW/DPC.
- 5) Mereka, yang pada tanggal 5 Januari 1973 M bertepatan dengan 30 Dzulqa'dah 1392 telah menjadi anggota salah satu dari 4 (empat) Partai Politik Islam yang berfusi membentuk PPP. langsung menjadi anggota PPP dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP oleh Pengurus Harian DPP/DPW/DPC sepanjang yang bersangkutan tidak atau belum menjadi anggota partai politik lain.

---

<sup>53</sup> Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar No. 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016 pada Bab II Bagian Pertama Persyaratan Pasal 3, h. 106-107.

- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dengan Pengurus Harian DPP PPP tentang keanggotaan dan Kaderisasi.

Untuk bergabung kedalam Partai Persatuan Pembangunan yang lebih dijelaskan oleh bapak soleh yaitu:

1. Sudah berumur 18 tahun.
2. Warga negaran Indonesia, memiliki KTP .
3. Mendaftar ke dewan pimpinan cabang DPC masing mengisi daerah asal.
4. Mengisi biodata dan berasal dari daerah itu sendiri.
5. Tidak terlibat tindak pidana dalam bentuk apapun.

Dengan wawancara pada bapak Muhamad Soleh Tanjung, ST. Beliau mengatakan “Dalam partai ini rekrutmen dilakukan secara terus menerus tidak hanya menjelang pemilu saja karena bagi orang politik besok adalah pemilu, begitu bngun pemilu, jadi harus terus bekerja mencari masa dukungan dan simpatisan sebanyak banyaknya, dengan duduk di kedai kopi di warung-warung dan ditempat umum lainnya, dengan menyamaikan dan menerangkan apa itu Partai Persutan Pembangunan, bagaimna itu Partai Persatuan Pembangunan, siapa itu Partai Persatuan Pembangunan dengan harapan memperkenalkan partai ini kepada orang banyak den mencari simpatisan dan ketertarikan orang sebanyak-banyaknya. Inilah yang disebut dengan rekrutmen non formal. Rekrutmen non formal tidak dilakukan diruangan secara khusus ataupun dengan melakukan pelatihan-pelatihan, artinya pola ini bebas dilakukan dimana saja dan kapan saja secara terbuka”.<sup>54</sup>

Pak Azwan Menambahkan pengkaderan secara non-formal yaitu melalui fusi partai. PPP adalah partai dari fusi 4 partai sebelumnya, yaitu NU, Parmusi, Perti dan PSII. Sekarang ke 4 partai itu telah menjadi ormas. Seluruh kader ormas tersebut merupakan pintu rekruietmen kader PPP yang berlangsung secara non-formal. Setiap kader dari ke 4 oramas tersebut, bila ingin masuk menjadi pengurus maka ia bisa langsung masuk tanpa harus melalui proses kaderisasi secara formal.<sup>55</sup>

Partai Persatuan Pembangunan memiliki 4 sayap partai itu:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Dengan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Dengan Bapak Muhammad Soleh Tanjung, ST., (Wakil Seketaris Bid. Hubungan Dan Kerjasama Antara Lembaga), Jum’at, 05 Mei 2017, Pukul: 16.00-17.00.

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Aswan Jaya, Tokoh Dan Kader Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Senin, 05 Juli 2017.

<sup>56</sup> Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar No. 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016 Bab 10, pasal 76 ayat 8, h. 98.

1. GPK, Gerakakan Pemuda Kabah,
2. Wanita Persatuan Pembanguna,
3. Angkatan Muda Kabbah,
4. Generrasi Muda Pembangunan Indonesia GMPI yang menangani mahasiswa.

Sayap partai ini berada disetiap struktur partai. Partai Persatuan Pembangunan memang berideologikan Islam, tetapi siapa saja berhak untuk masuk kedalam partai ini, non-Islam boleh saja masuk untuk menjadi kader. Bapak Muhammad Soleh Tanjung, ST menganalogikannya Ibaratakan rumah besar siapa saja boleh bertamu datang, boleh duduk di teras, diruang tamu tapi tidak boleh masuk dalam kamar. Dalam artian tidak boleh mengerus partai. Partai Persatuan Pembangunan ini boleh dipilih non-Muslim karena terbuka untuk siapa saja karena Islam itu *Rahmatin Lil Alamain*, ibaratkan sebuah rumah, kita tidak menutup tamu datang, kita tidak menutup diri siapa saja yang datang, tapi untuk masuk ke kamar-kamarnya hanya orang orang yang tertentu yang bisa masuk.<sup>57</sup>

Keterbukaan partai ini sejatinya dilakukan untuk mengarahkan kepentingan kepada substansi masalah bangsa agar lebih bersih, peduli dan profesional dengan menyerap dan menyalurkan aspirasi kawan kawan atau masyarakat ke dalam pemerintahan baik yang Muslim maupun non-Muslim. Partai ini memberikan semangat ketebukaan lalu memanifestasikannya dalam akhlak Islam dengan kerja keras, peduli dan profesional. Intinya Siapa saja bisa masuk PPP dan menerima konsekuensi ideologis bukan konsekuensi agamanya. Partai juga ingin menunjukkan bahwa Islam itu sendiri adalah *Rahmatin Lil Alamin*.

Keterbukaan partai ini juga merupakan bagian dari strategi untuk mendulang suara dalam setiap pemilihan, mencari simpatisan yang bukan hanya dari umat Muslim saja, juga dari non-Mulim. Seperti yang penulis amati saat ini ditengah

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Dengan Bapak Muhammad Soleh Tanjung, ST., (Wakil Seketaris Bid. Hubungan Dan Kerjasama Antara Lembaga), Jum'at, 05 Mei 2017, Pukul: 16:00-17.00.

pemilih partai Islam yang disetiap masanya semakin berkurang, partai Islam seharusnya mengambil pelajaran karena hari ini partai Islam tidak jauh berbeda dengan partai dengan ideologi lainnya.

### **C. Tujuan Rekrutmen/ Kaderisasi**

kaderisasi merupakan sebuah penggodokan atau menyiapkan sumber daya manusia untuk mewakili partai politik dalam menduduki jabatan-jabatan politik. Dalam melahirkan pemimpin dan kader yang loyal serta berkualitas terhadap partai politik. Setiap anggota partai politik belum tentu otomatis menjadi kader partai. Bagi anggota yang tertarik untuk menjadi kader partai, terlebih dahulu haruslah mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian setelah lulus seleksi anggota tersebut harus mengikuti proses pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti proses pengkaderan, calon kader itu akan mendapatkan pendidikan politik kader.

Adapun tujuan rekruteman Partai Persatuan Pembangunan diagi dua yaitu: pertama, secara kuantias untuk memperbanyak jumlah masa, dan memperoleh suara sebanyak mungkin dalam setiap pemilihan. Kedua secara kualitas, terkhusus dalam proses pengkaderan ialah untuk meningkatkan kualitas kader sebagai calon pelanjut kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Pendidikan politik lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai yang pada intiya memajukan partai ini.

### **D. Hasil Pengkaderan**

Hasil dari pengkaderan itu sendiri ialah dengan melihat praktik dilapangan yang dilakukan oleh kader-kader yang dihasilkan melalui proses pengkaderan. Terkait bagaimana mencari simpati dari masyarakat agar mau memilih bergabung dan masuk dalam PPP. Inti berpolitik ini bagaimana mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk memilih partai, syiasah bagamana pola merekrut orang supaya memilih partai.

Dalam arti kata bukan untuk kepentingan kita pribadi tetapi untuk kepentingan bersama, karena sistem direpublik kita ini kalau kita tidak memiliki kekuasaan kita tidak bisa mengontrol atau mengarahkan untuk kebijakan umat. Makanya hasil dari kader itu bagaimana mengajak menyeruh orang agar masuk dalam partai ini, salah satunya dengan menunjukan dirinya adalah kader, saya loh kader PPP, dengan artian melakukan tindakan-tindakan yang baik yang membangun masyarakat, dan membedakan dirinya dengan dengan yang lain. karena kita berasaskan islam, jadi kita harus sesuai dengan Islam itu sendiri.<sup>58</sup>

Proses pengkaderan yang menghasilkan para tokoh-tokoh atau figur-figur yang nantinya siap untuk di distribusikan kedalam jabatan-jabatan publik seperti eksekutif , legislatif dan lainnya. Melalui tokoh atau figur inilah partai berharap banyak dalam mendulang suara di setiap pemilu.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) survei yang dilakukan pada 10-23 Mei 2013. Survei ini dilakukan di 31 provinsi, melibatkan 1.799 responden dari seluruh Indonesia, dengan *margin of eror* hingga 2,31 persen dari tingkat akurasi 95 persen. Hasil dari survei tersebut ialah masyarakat saat ini berkecendrungan kuat lebih memilih figur atau tokoh dari pada parpol. Survei membuktikan bahwa 58 persen dari total responden menyatakan akan memilih caleg, dan hanya 30 persen yang menyatakan akan memilih parpol.<sup>59</sup> Artinya melalui proses pengkaderan parpol harus bisa menciptakan figur atau tokoh yang laku untuk dijual kepada masyarakat, agar partai mampu mendulang suara yang banyak dalam setiap pemilihan.

Proses pengkaderan telah banyak menghasilkan tokoh-tokoh, termasuk seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Karena untuk menjadi pengurus atau pimpinan partai lebih

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Dengan Bapak Muhammad Soleh Tanjung, ST., (Wakil Seketeris Bid. Hubungan Dan Kerjasama Antara Lembaga), Senin, 29 Mei 2017, Pukul 14.00-15.00.

<sup>59</sup> Dudi Mardiyansyah, *Kampanye Menghipnosis Audiens*, (Jakarta: Selaris Publisher, 2014), h. 9.



mengutamakan kader yang lahir dari proses pengkaderan yang ada didalam partai tersebut. Terkhusus untuk menjadi pimpinan partai lebih mengutamakan kader partai dan boleh dari bukan kader partai itu tetapi dia harus dari organisasi kemasyarakatan terutama fusi partai, seperti Nadhatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (PARMUSI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Dalam hal pencalonan anggota legislatif dan kepala daerah partai PPP juga lebih mengutamakan kader-kadernya dimana yang memiliki potensi untuk meraih suara atau memenangkan pemilu, dimana untuk calon anggota legislatif 75 % itu dari kader partai dan 25% lagi terbuka untuk umum, yang mana jauh-jauh hari sebelum pileg partai membuka daftar caleg yang ingin maju melalui partai ini.

Partai politik biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dalam rangka mencari menyerap aspirasi rakyat sembari mencari simpati dari masyarakat dengan cara turun langsung kemasyarakat mengamati lalu melihat kendala-kendala serta apa yang dibutuhkan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai umat terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umat, seperti yang dilakukan PPP Sumut baru baru ini yaitu dengan mengadakan menghadiri acara Maulid diberbagai daerah di Sumatera Utara seperti di Kisaran, Asahan, Batu Bara. Bekerja sama dengan NU melakukan temu Umat. Melakukan suntan masal di daerah minoritas muslim yaitu Toba Samosir bekerja sama dengan Mesjid Raya Tobasa. Meskipun partai Islam khususnya PPP tidak pernah mendulang suara di daerah yang umat muslimnya minoritas, tetapi partai ini tetap melakukan kegiatan kegiatan di daerah minoritas muslim tersebut, daerah-daerah ini dalam bahasa partai yang berbasis Islam disebut dengan jalur gaza. jika kaji-kaji politis partai ini rugi berbuat disana, tetapi karena PPP itu partai umat partai dakwah ya kerjanya itu, sembari kita berdakwah , untuk mengayomi umat Islam yang ada. Kegiatan tetap ada karena partai ini bukan hanya orientasinya politik juga berorientasi dakwah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang penuh dengan sejarah panjang di pentas perpolitikan tanah air Indonesia. Partai yang lahir dari penggabungan partai-partai Islam ini mengikuti pemilu pertamanya ditahun 1971, dan hingga saat ini partai PPP tetap mampu bertahan dan selalu ikut serta dalam pemilu. Tidak mudah untuk menjadi partai yang terus bertahan dari era Orde Baru dan hingga saat ini era Reformasi. Terbukti sudah banyaknya partai-partai yang kehilangan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sehingga mengakibatkan bubarnya partai tersebut.

Keberhasilan PPP yang mampu bertahan dan tetap eksis di ranah perpolitikan Indonesia tentunya tidak lepas dari proses pengelolaan internal maupun eksternal partai yang mampu mengatur keberlangsungan partainya. Partai politik tidak akan mampu bertahan tanpa adan dukungan dan kepercayaan masyarakat serta partai tidak akan berjalan tanpa ada orang-orang yang berada didalam partai tersebut. Proses inilah yang terus dijalankan Partai Persatuan Pembangunan khususnya DPW PPP Sumatera Utara melakukan proses perekrutan dan pengkaderan secara terus-menerus baik itu secara formal maupun non formal.

Partai politik sering dijadikan Kendaraan politik menunjukan suatu proses dimana seseorang melakukan, suatu perjalanan politik, ingin bersaing untuk mendapatkan jabatan politik seperti gubernur, bupati, yang membutuhkan suatu kendaraan. Kendaraan tersebut berupa partai politik yang memiliki representasinya diparlemen. Partai Persatuan Pembangunan juga melaksanakan fungsi partai politik yaitu sebagai kendaraan politik tetapi partai ini lebih mengutamakan kadernya untuk bersaing dalam menduduki jabatan jabatan yang ada di pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif.

Salah satu fungsi partai politik ialah penyerapan aspirasi rakyat sebagai pelayan publik. Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara melakukan fungsi partai dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat juga melakukan sosialisasi sembari mencari simpatik dari masyarakat itu sendiri, dengan cara turun langsung kemasyarakat mengamati lalu melihat kendala-kendala serta apa yang dibutuhkan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai umat terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umat, seperti yang dilakukan PPP Sumut baru baru ini yaitu dengan mengadakan menghadiri acara Maulid diberbagai daerah di Sumatera Utara seperti di Kisaran, Asahan, Batu Barat. Bekerja sama dengan NU melakukan temu Umat. Melaakukan sunatan masal di daerah minoritas muslim yaitu Toba Samosir bekerja sama dengan Mesjid Raya Tobasa.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Sebagai salah satu partai politik yang berideologikan Islam, Partai Persatuan Pembangunan ini diharapkan Agar tetap konsisten memegang teguh ideologi yang digunakan.
2. Berangkat dari sejarah panjang Partai Persatuan Pemabangunan menurut penulis partai politik harus menyadari bahwa kaderisasi hal yang paling menentukan terhadap keberlangsungan partai.
3. Diharapkan kepada kader Partai Persatuan Pembangunan lebih pro aktif menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat umum baik itu yang di legsilaif maupun eksekutif. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi Ridho. 2013. *Partai Politik Islam: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali Muhammad Safaat. 2011. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar No. 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016.
- Anwar Dessy. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia Surabaya.
- Basrowi. Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Parian Konteporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Canggara Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damsar. 2013. *Pengeantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2016. *Al-Quran Dan Terjemah*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia.
- Faisal Sanapiah. 2008. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Firmanzah. 2012. *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmanzah. 2010. *Persaingan Legitimasi Kekuasaan Dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haris Syamsuddin. 1957. *PPP Dan Politik Order Baru*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hadi Sutrisno. 1995. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Azwan Jaya, Tokoh Dan Kader Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Senin, 05 Juni 2017.
- Hasil Wawancara Dengan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Dengan Bapak Jafaruddin Harahap, SPd., M. Si., (Sekretaris), Jumat, 05 Mei 2017.
- Hasil Wawancara Dengan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Dengan Bapak Muhammad Soleh Tanjung, ST., (Wakil Seketeris Bid. Hubungan Dan Kerjasama Antara Lembaga), Senin, 29 Mei 2017.
- Ismail Faisal. 2012. *Republik Bhinneka Tunggal Ika: Mengurai Isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama, Dan Sosial Buday*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mardiyansah Dudi. 2014. *Kampanye Menghipnosis Audiens*. Jakarta: Selaris Publisher.
- Marjian Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Salim dan Syahrums. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Cipta Pustaka Media.

Scruton Roger. Ahmad Lintang Lazuardi (Peterjemah). 2013. *Kamus Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surbakti Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Syarbaini, Rusdiyanta, Doddy Wihardi. 2011. *Pengetahun Dasar Ilmu Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Tim Divaro dan Yugha, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, 2014. Jakarta. Erlangga.



Wawancara Dengan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Dengan Bapak Muhammad Soleh Tanjung, ST., (Wakil Seketeris Bid. Hubungan Dan Kerjasama Antara Lembaga), Senin, 29 Mei 2017, Pukul 14.00-15.00.



Hasil Wawancara Dengan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera utara Dengan Bapak Jafaruddin Harahap, SPd., M. Si., (Sekretaris), Jumat, 05 Mei 2017, pukul 17.00-18.00.





Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Jln. Raden Saleh No. 11.